

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima

5.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa dana TP merupakan dana APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP. Dana TP Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

5.1.2 Dana dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tabel 5.1
Dana TP Yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2014

No	SKPD/ Satker	K/L Pemberi Dana TP	Total Dana (Rp.juta)	Realisasi (Rp.juta)	%
1	Dinas Pertanian TP	Kementan	189.789,745	173.576,213	91,46
2	Dinas Perkebunan	Kementan	36.075,4	33.205,48	92,04
3	Dinas Peternakan dan Keswan	Kementan	15.288,13	14.168,25	92,67
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kemen. Pariwisata	1.000,00	936,8	93,68
5	Dinas Sosnakertran	Kemendes, PDT & trans	2.881,69	1.229,26	42,66
6	Dinas Sosnakertran	Kemen. Sosial	3.718,16	3.667,84	98,65
	Dinas Kelautan dan Perikanan	KKP	4.354,343	1.971,95	45,29
8	Dinas PU	Kemen. PUPR	34.522,63	34.522,63	100
	J U M L A H		116.539,65	110.844,49	87,36

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi , (data diolah)

Dana Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp287.630.100.000,00 yang berasal dari Kementerian Pertanian RI Rp220.949.940.000,00, Kementerian Pariwisata RI sebesar Rp1.000.000.000,00, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar 2.881.690.000,00, Kementerian Sosial sebesar Rp3.718.160.000,00, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.354.343.000,00 dan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp34.522.630.000,00. Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana TP TA. 2015 yang dikelola SKPD/SATKER Provinsi Jambi adalah sebesar Rp263.278.420.000,00 atau 91,53%.

5.1.3 Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang melaksanakan TP adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum.

5.1.4 Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

5.1.4.1 Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2015 dialokasikan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.259.564.000,00. Melalui kegiatan ini Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengelolaan sistem perbenihan ikan dengan meningkatkan produksi induk unggul dan unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat diselesaikan 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.254.484.000,00 atau sebesar 99,60%.

b. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.094.780.000,00 untuk melaksanakan 3 kegiatan yaitu kegiatan pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan, kegiatan pengembangan produk dan usaha pasca panen non pangan hasil perikanan, dan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Pada kegiatan Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan dilakukan fasilitasi sarana dan prasarana industri pengolahan hasil perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp461.000.000,00 dan terlaksana 99,98% secara fisik dan keuangan. Sementara itu, kegiatan pengembangan produk dan usaha pasca panen non pangan hasil perikanan mendapatkan

alokasi terbesar yaitu Rp2.566.440.000,00 tidak terlaksana optimal dimana hanya terealisasi secara fisik dan keuangan sebesar 7,58%. Sedangkan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp67.340.000,00 telah direalisasikan secara fisik dan keuangan sebesar 92,41%. Rendahnya realisasi ini diakibatkan oleh kenaikan harga barang sehingga standar harga pada DIPA tidak cukup untuk merealisasikan kegiatan.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp4.354.344.000,00. Dana tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp1.259.564.000,00 dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp3.094.780.000,00.

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menemui permasalahan dalam satuan harga pada DIPA yang tidak mencukupi akibat kenaikan harga barang. Hal ini menyebabkan spesifikasi yang direncanakan tidak sesuai dengan ketersediaan dana atau dana tidak mencukupi. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan menyampaikan usulan revisi ke Kementerian. Namun pihak Kementerian tidak memberikan persetujuan sehingga kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan.

4. Tugas pembantuan yang diberikan

Tugas pembantuan yang diberikan/diserahkan kepada masyarakat/pemerintah kabupaten/kota yaitu : Tugas Pembantuan

Satker DKP Provinsi Jambi (04) melalui Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dan Tugas Pembantuan Satker DKP Provinsi Jambi (06) Tahun Anggaran 2015 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dengan kegiatan :

1. Bantuan Induk lele sebanyak 53 paket diantaranya 20 paket di Kota Jambi, 30 paket di Kabupaten Muaro Jambi, dan 3 paket di Kabupaten Kerinci.
2. Bantuan induk patin sebanyak 1.000 kg di Kota Jambi.
3. Bantuan pakan *grower* sebanyak 15.000 kg diantaranya 7.000 kg di Kabupaten Kerinci, 2.000 kg di Kabupaten Merangin, 2.000 kg di Kabupaten Sarolangun dan 4.000 kg di Kota Jambi.
4. Bantuan induk nila sebanyak 50 paket antara lain 5 paket di Kabupaten Muaro Jambi, 5 paket di Kabupaten Merangin, 5 paket di Kabupaten Tanjab Barat, 5 paket di Kota Jambi, 15 paket di Kabupaten Kerinci, dan 15 paket di Kabupaten Tebo.
5. Bantuan Pakan *starter* sebanyak 3.000 kg di Kabupaten Kerinci, 1.000 kg di Kabupaten Merangin, 1.000 kg di Kabupaten Sarolangun dan 2.000 kg di Kota Jambi.
6. Bantuan induk lele sebanyak 120 paket diantaranya 50 paket di Kota Jambi, 10 paket di Kabupaten Kerinci, 15 paket di Kota Sungai Penuh, 10 paket di Kabupaten Bungo, dan 40 paket di Kabupaten Muaro Jambi.
7. Pengadaan SRD dan alat pengolahan di Kota Jambi sebanyak 1 paket.
8. Pengadaan SRD dan alat pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 1 paket.
9. Pengadaan sarana pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 1 paket.

5.1.4.2 Dinas Pekerjaan Umum

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan TA. 2015 adalah program pengelolaan sumber daya air (SDA) meliputi kegiatan peningkatan tata kelola pengelolaan SDA terpadu serta operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp34.522.631.000,00. Program ini telah terealisasi sebesar 100% secara fisik dan keuangan dengan metode pelaksanaan berupa operasi rutin dan pemeliharaan rutin serta pemeliharaan berkala yang dilakukan secara swakelola.

Lingkup pekerjaan yang dilakukan antara lain tebas pembersihan dan pemeliharaan rutin sebanyak 3 tahap dalam 1 tahun anggaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan perawatan pintu air. Adapun lokasi kegiatan adalah Daerah Irigasi Siulak Deras, Daerah Irigasi Batang Sangkir, Daerah Rawa Lagan Hulu, Daerah Rawa Lagan Simpang Pandan dan Daerah Rawa Sei Alang – Alang.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas PU Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp34.522.631.000,00 yang berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Irigasi:

Hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan irigasi yaitu lokasi yang sulit dicapai

karena kondisi alam dan tuntutan ganti tanam dari masyarakat setempat.

2. Rawa:

Pencapaian pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa menemui kendala dalam kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan rawa yaitu terhambatnya proses kegiatan dikarenakan kondisi alam, curah hujan yang tinggi dan lokasi yang sulit dicapai karena infrastruktur yang belum memadai.

Solusi yang dilakukan adalah mempresentasikan hasil evaluasi kegiatan pada TA. 2015 ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga diharapkan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi pada kegiatan di masa yang akan datang.

5.1.4.3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

a. Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial

Program yang dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Melalui anggaran sebesar Rp3.718.160.000,00 telah dilaksanakan Pembangunan Rumah bagi Warga KAT di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin, dengan total sebanyak 63 Unit rumah serta pemberdayaan bagi warga KAT sebanyak 235 KK.

b. Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi

Melalui dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sejumlah Rp2.881.695.000,00 dilaksanakan dua program yaitu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi masing – masing sebesar Rp1.943.180.000,00 dan Rp938.515.000,00. Kegiatan yang

dilaksanakan melalui program penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi meliputi :

1. Kegiatan Fasilitas Penempatan Transmigrasi sebanyak 50 KK
2. Kegiatan Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi seluas 7.000 Ha dan 200 Ha (1 paket).
3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.

Sedangkan pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi telah dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKT sebanyak 100 dokumen.
2. Pengembangan Usaha Transmigrasi seluas 20,75 Ha
3. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi sebanyak 83 paket untuk 83 KK transmigrasi.
4. Pelayanan Pertanian Transmigrasi sebanyak 50 persil/bidang.
5. Promosi Kemitraan, sebanyak 6 paket.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Pada Tahun 2015, Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi menerima alokasi dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp6.599.855.000,00, masing – masing bersumber dari Kementerian Sosial sebesar Rp3.718.160.000,00 dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar Rp2.881.695.000,00.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini, hanya saja terjadi sedikit keterlambatan akibat perubahan nomenklatur Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan.

5.1.4.4 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui dana Tugas Pembantuan TA. 2015 yang diberikan oleh Kementerian Pertanian RI, melaksanakan beberapa program yaitu:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan program ini berasal dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan berikut:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.937.400.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.550.945.000,00 atau 80,05% dan realisasi fisik sebesar 95,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini ada 3, yaitu:
 - Laporan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebanyak 4 laporan.
 - Jumlah Lokasi Ubinan Kedelai sebanyak 20 lokasi.
 - Peningkatan Produktifitas Melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai seluas 1.000 Ha.
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealialia
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp3.372.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.352.750.000,00 atau 99,41% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:
 - Laporan pengelolaan produksi serealialia sebanyak 4 laporan.
 - Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Komoditas Jagung seluas 1.500 Ha.
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp750.000.000,00 atau 100,00%

dan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan sebanyak 7 (tujuh) unit.

4. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp924.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp866.378.400,00 atau 93,76% dan realisasi fisik sebesar 99,00%.Adapun Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

- Laporan Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan sebanyak 11 Laporan.
- Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Jagung sebanyak 30 Kelompok.

5. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp373.068.000,00 dan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp354.775.000,00 atau 95,10% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

- Dokumen Rancangan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Tanaman Pangan sebanyak 1dokumen.
- Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan sebanyak 4 laporan.
- Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan selama 12 (dua belas) bulan.
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebanyak 34 unit.

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

Dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan program ini berasal dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian RI dandigunakan untuk melaksanakan 3 kegiatan yaitu:

1. Pengembangan Pemasaran Domestik

Anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp631.400.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp592.330.800,00 atau 93,81% dan realisasi fisik sebesar 100%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik sebanyak 2 (dua) unit.

2. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp6.910.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp6.519.346.900,00 atau 94,35% dan realisasi fisik sebesar 100%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

a) Pengadaan Unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan sebanyak 18 unit.

b) Pengadaan Unit usaha pengolahan hasil hortikultura sebanyak 1 unit.

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp179.650.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp167.069.600,00 atau 93,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output kegiatan ini adalah laporan Kegiatan dan Pembinaan sebanyak 1 (satu) laporan.

c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Dana Tugas Pembantuan (TP) untuk pelaksanaan program ini berasal dari Direktorat Jenderal Sarana Prasarana dan dipergunakan untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp59.543.183.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp52.851.445.475,00 atau 88,76% dan realisasi fisik sebesar

97,50%.Output kegiatan ini adalah pengembangan Jaringan Irigasi seluas 28.703 Ha dan layanan perkantoran selama 12 bulan.

2. Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp70.017.463.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp65.314.865.387,00 atau 93,28% dan realisasi fisik sebesar 99,25%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu :

- a) Optimasi Lahan seluas 29.254 Ha.
- b) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) seluas 700 Ha.
- c) Pendampingan Cetak Sawah seluas 600 Ha.
- d) Perluasan Sawah seluas 1.000 Ha.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp31.330.792.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp30.072.584.900,00 atau 95,98% dan realisasi fisik sebesar 97,98%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

- a) alat dan mesin pertanian sebanyak 465 unit, dan
- b) Fasilitasi penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian sebanyak 4 paket.

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp5.799.588.000,00 dan keuangan terealisasi sebesar Rp4.859.602.800,00 atau 83,79% dengan realisasi fisik sebesar 95,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pelayanan proses manajemen dan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan.

5. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp7.670.701.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp7.227.507.700,00 atau 94,22% dan realisasi fisik sebesar 97,50%. Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

- a) Fasilitas pestisida untuk pertanian sebanyak 2 paket.
- b) Pendampingan Penyaluran Pupuk sebanyak 11 paket.

6. Pelayanan Pembiayaan Pertanian Dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp286.425.500,00 atau 81,84% dan realisasi fisik sebesar 95,00%. Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah fasilitasi Pembiayaan Pertanian sebanyak 7 paket.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Total jumlah dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diterima oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp189.789.745.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp7.356.968.000,00 bersumber dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar
- b. Rp7.721.050.000,00 bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP)
- c. Rp174.711.727.000,00 bersumber dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Secara keseluruhan realisasi keuangan dari penggunaan dana TP TA. 2015 yang dikelola SKPD/SATKER Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi adalah sebesar Rp174.766.027.462,00 atau 92,08%, dengan realisasi fisik mencapai 95,62%.

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- Adanya revisi akun, *self blocking* pada RKAKL/DIPA-Online yang menyebabkan proses revisi terhambat, adanya lunturn dana tambahan untuk pencapaian sasaran *output* dan *outcome* yang bertambah.
- Kemarau panjang dan kebakaran lahan menyebabkan kekeringan dan asap sehingga para petani tidak dapat bercocok tanam. Hal ini berdampak dari rendahnya serapan anggaran
- Ketersediaan benih yang tidak sesuai dengan jadwal tanam sehingga banyak terjadi pergeseran waktu tanam bahkan ada yang tidak ditanam menyebabkan menurunnya luas tanam yang berdampak pada penurunan luas panen dan produksi.
- Lambatnya proses pengadaan dan penyesuaian spesifikasi barang dan jasa menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran.
- Jaringan irigasi yang telah dibangun belum dapat memenuhi seluruh areal penanaman sehingga kebutuhan air untuk meningkatkan produksi belum sepenuhnya tercukupi. Selain itu kebanyakan irigasi tersier yang telah dibangun tidak langsung terhubung dengan jaringan irigasi primer dan Sekunder.
- Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang belum sesuai untuk belanja bahan pada pengadaan alat, bangunan, benih, dan pupuk, sehingga terjadi beberapa komponen pengadaan yang dikembalikan.
- Belum sesuainya jadwal pengadaan dengan jadwal tanam petani, sehingga jadwal pertanaman bergeser sebagai akibat proses pengadaan oleh pihak ketiga agak terlambat.
- SK Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Program dan Pejabat Teknis agak terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pokok dan pendukung belum sesuai jadwal akibatnya kegiatan banyak menumpuk pada triwulan III dan IV.

b. Solusi

- Percepatan proses revisi akun dan revisi DIPA dengan melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan DJPB, KPPN dan Eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Percepatan pengeluaran regulasi kebijakan penggunaan pupuk bersubsidi.
- Perbaiki koordinasi dengan pihak terkait serta percepatan proses pengajuan kebutuhan pupuk.
- Pengaturan jadwal penanaman benih di penangkar, sehingga saat menjadi benih sebar sesuai dengan jadwal penanaman di petani.
- Koordinasi dengan pihak terkait (PU dan Bappeda) dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi yang tersedia dan rencana pembangunan jaringan irigasi untuk areal sawah yang belum ada, serta rencana design pengembangan sawah sesuai kewenangan.
- Perbaiki perhitungan standar harga barang dan melakukan survey pasar sesuai harga yang berlaku.
- Percepatan Proses pengadaan agar sesuai dengan jadwal tanam yang telah ditetapkan oleh kelompok tani.
- Diharapkan kedepan DIPA dapat diterima akhir bulan Desember atau awal Januari tahun berjalan.

5.1.4.5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada TA. 2015 melaksanakan Program Pelestarian Budaya melalui Dana Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang berlokasi pada Museum Perjuangan Rakyat Jambi.

Melalui alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, dilakukan Revitalisasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dengan melaksanakan pembongkaran beberapa bagian, pekerjaan interior, pengecatan, pekerjaan plafond, instalasi listrik dan pemasangan keramik lantai. Sampai dengan akhir Desember 2015, pekerjaan telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp936.804.725,00 atau sebesar 93,68%.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui DIPA Nomor: 023.15.4.100176/2014 tanggal 14 November 2014.

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- DIPA baru diterima pada awal bulan Mei 2015 sehingga proses di KPPN ikut terlambat.
- Pejabat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi hanya beberapa orang yang memiliki sertifikat barang dan jasa sehingga harus memberdayakan staf dari instansi lain.

b. Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI agar tidak terlagi lagi keterlambatan DIPA.
- Mendorong agar pejabat di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi memiliki sertifikat barang dan jasa.

5.1.4.6 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Keseluruhan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana TP yang Diterima/Dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Jumlah dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp15.288.125.000,00 bersumber dari Kementerian Pertanian RI.

3. Permasalahan dan Solusi

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 tidak menemui permasalahan.

4. Tugas Pembantuan yang Diberikan

a. Sumber Dana Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) – Kementerian Pertanian

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Ternak

a) Pengembangan Budidaya Sapi Potong

Kegiatan pengembangan budidaya sapi potong ini diberikan untuk pengembangan indukan di UPTD Provinsi/Kabupaten.

Tabel 5.2
UPTD Penerima Kegiatan Pengembangan
Budidaya Sapi Potong

No	Nama UPTD	Jumlah Paket	Lokasi
1	UPTD Tebo	1 Paket	Kabupaten Tebo
2	UPTD Provinsi	1 Paket	Kota Jambi
3	UPTD Merangin	1 Paket	Kabupaten Merangin
4	UPTD Ma. Jambi	1 Paket	Kabupaten Ma. Jambi

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2016

Untuk meningkatkan populasi sapi potong telah dilaksanakan pula penyerahan ternak sapi potong kepada kelompok dengan uraian pada tabel 20 berikut:

Tabel 5.3
Alokasi Ternak Sapi Potong

No	Kab/Kota	Jumlah Ternak (ekor)		Keterangan
		Jantan	Betina	
1.	Kerinci	2	20	1 kelompok
2.	Merangin	3	22	1 kelompok
3.	Muaro Jambi	3	33	1 kelompok
4.	Tanjab Barat	3	22	1 kelompok
5.	Sarolangun	6	44	2 kelompok
6	Tebo	6	44	2 kelompok

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2016

b) Pengembangan Budidaya Kerbau

Pada kegiatan pengembangan budidaya kerbau adalah dengan melaksanakan penyerahan ternak kerbau betina.

Tabel 5.4
Alokasi Ternak Kerbau pada Kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau

No	Kabupaten	Jumlah Ternak (ekor)	Keterangan
1	Sarolangun	21 Ekor	1 kelompok
2	Kerinci	21 Ekor	1 kelompok
4	Muaro Jambi	42 Ekor	2 kelompok

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2016

c) Penyebaran Pejantan Kerbau

Pengembangan budidaya kerbau tentu membutuhkan pejantan untuk perkembangbiakannya. Untuk itu pada tahun 2015 telah dilaksanakan pula penyebaran pejantan kerbau dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Alokasi Ternak Kerbau Pejantan

No	Kabupaten	Jumlah Ternak (ekor)	Keterangan
1	Sarolangun	20 Ekor	
2	Kerinci	20 Ekor	
3	Muaro Jambi	15 Ekor	

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2016

2. Peningkatan Pakan Ternak

a) Pengembangan Integrasi Ternak-Sawit

Melalui Pengembangan Integrasi Ternak-Sawit telah dilaksanakan pula penyebaran ternak sapi dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Penyebaran Ternak Sapi Kegiatan Integrasi Ternak-Sawit

No	Kab/Kota	Jumlah Ternak (ekor)		Keterangan
		Jantan	Betina	
1.	Sarolangun	2	18	1 kelompok
2.	Tanjab Barat	2	18	1 kelompok
3.	Tanjab Timur	2	18	1 kelompok
4	Tebo	2	18	2 kelompok

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2016

b) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas

Meliputi pengadaan dan penanaman bibit/benih hijauan makanan ternak sebanyak 120.000 stek serta penyerahan alat pengolah tanah dan chopper.

b. Sumber Dana Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) – Kementerian Pertanian

Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
 - a) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Biogas)
 - b) Pengembangan Pengolahan Pakan Ternak
 - c) Pengembangan Pengolahan Daging

Tabel 5.7
Uraian Kegiatan Ditjen PPHP tahun 2015

No.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1	Sarana Fasilitas Pengolahan Daging	Kab. Tebo	1 Paket
2	Bangunan Pengolahan Daging	Kab. Tebo	1 Paket
3	Fasilitas sarana pengolahan pakan ternak	Kota Sei. Penuh	1 Paket
4.	Bangunan Pengolahan Pakan Ternak	Kota Sei. Penuh	1 Paket
5	Biogas	Kab. Merangin	1 Paket

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

c. Sumber Dana Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) – Kementerian Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan kegiatan meliputi supervisi dan pembinaan aspek air; supervisi dan pembinaan aspek lahan serta supervisi dan pembinaan aspek alsintan.

5.2 Dana Dekonsentrasi yang Diterima

5.2.1 Dana dan Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp236.899.748.010,00 yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BNPB dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara keseluruhan realisasi penggunaan

dana Dekonsentrasi TA. 2015 yang dikelola SKPD/SATKER Provinsi Jambi adalah sebesar Rp194.536.258.548,00 atau 82,12%.

Tabel 5.8
Dana Dekonsentrasi yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2015

No	SKPD/ Satker	K/L Pemberi Dana Dekonsentrasi	Total Dana (Rp.juta)	Realisasi (Rp.juta)	%
1	Dinas Pertanian TP	Kementan RI	31.273,01	26.219,33	83,84
2	Dinas Pendidikan	Kemendikbud RI	23.686,34	19.672,61	83,05
3	BPMPP	Kemendagri RI	25.559,95	23.583,11	90,82
		Kemen.PPPA	514	368,95	71,78
4	Dinas Perindag	Kemendag RI	2.681,527	2.454,84	91,55
		Kemenperin RI	2.500	2.408,804	96,35
5	Bandiklatda	Kemendagri RI	155,09	148,25	95,59
6	Bappeda	Kemendagri RI	643,0	373,133	58,03
		Bappenas RI	931,291	831,69	89,3
7	BPBD	BNPB	467,77	370,97	79,31
8	Sekretariat Daerah	Kemendagri RI	5.390,49	4.036,23	74,88
9	Dinas Peternakan dan Keswan	Kementan RI	6.415,72	6.156,79	95,96
10	Dinas Perkebunan	Kementan RI	8.426,06	7.708,96	91,49
11	Bakorluh	Kementan RI	14.778,29	13.779,67	93,24
12	Badan perpustakaan dan Arsip Daerah	ANRI	535,34	522,66	97,63
13	Dinas Sosnakertrans	Kemensos RI	15.967,59	15.093,03	94,52
		Kemenaker RI	17.227,57	15.961,7	92,65
14	Dinas kelautan dan Perikanan	KKP RI	8.230,76	7.061,56	85,79
15	Badan Ketahanan Pangan	Kementan RI	5.339,78	4.500,71	84,29
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kemendikbud RI	1.746,70	1.660,34	95,06
17	Dinas Kesehatan	Kemenkes RI	21.575,35	19.045,15	88,27
18	BPMD dan PPT	Kemendagri RI	849,94	613,18	72,14
19	Dinas Kehutanan	Kementerian LHK	3.837,56	3.223,22	83,99
20	Satpol PP	Kemendagri RI	859,00	836,58	97,39
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	kemenpora	8.069,46	7.548,55	93,54
22	Dinas Koperasi dan UMKM	Kemen. KUKM RI	6.827,85	4.697,59	68,80
23	Dinas PU	Kemen. PUPR	5.489,01	4.628,02	84,31
TOTAL			236.899,75	194.536,26	82,12

5.2.2 Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

5.2.2.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Program yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan menggunakan dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian RI pada TA. 2015 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini berasal dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp525.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp423.243.250,00 atau 80,62% dan realisasi fisik sebesar 95,27%. Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah laporan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi sebanyak 3 laporan.

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp605.572.000,00 dengan realisasi sebesar Rp547.494.450,00 atau 90,41% dan realisasi fisik sebesar 97,15%. Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah laporan pengelolaan produksi sereal sebanyak 7 laporan.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan,

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp1.589.165.000,00 dengan realisasi kegiatan

sebesar Rp.1.487.573.600,00 atau 93,61% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output kegiatan ini adalah :

- a) Penilaian Varietas, Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebanyak 1unit.
- b) Perbanyak Benih Sumber tanaman pangan (BBI) sebanyak16Ha.
- c) Sarana Prasarana, Peralatan dan Inventaris Kantor BBI sebanyak 13unit.
- d) Sarana prasarana, peralatan laboratorium BPSBTPH sebanyak10unit.
- e) Pengadaan Sarana prasarana, peralatan dan inventaris kantor BBI sebanyak 2 unit.

4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp1.653.350.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.551.499.200,00 atau 93,84% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai yaitu :

- a) Jumlah pembuatan pedoman perlindungan tanaman pangan sebanyak 1 pedoman.
- b) Pembuatan database perlindungan tanaman pangan sebanyak 1 database.
- c) Pembuatan bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT dan DPI) sebanyak 2 Bahan.
- d) Frekuensi pelaksanaan gerakan pengendalian opt tanaman pangan sebanyak 1 kali.
- e) Melaksanakan penilaian POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani Berprestasi sebanyak 3 kali.
- f) POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi sebanyak 1paket.

- g) Lamanya proses administrasi pelaksana kegiatan perlindungan tanaman pangan selama 12 bulan.
 - h) Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan sebanyak 30 orang.
 - i) Jumlah pengadaan alat operasional Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar sebanyak 1 unit.
 - j) Jumlah operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) sebanyak 1 unit.
 - k) Pembuatan laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan sebanyak 41 laporan.
5. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
- Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp142.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp141.704.500,00 atau 99,79% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output kegiatan ini adalah:
- a) laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan sebanyak 2 laporan.
 - b) rapat koordinasi pasca panen sebanyak 2kali.
6. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan
- Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp3.523.094.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.307.252.323,00 atau 93,87% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output kegiatan ini adalah:
- a) Dokumen perencanaan kegiatan/anggaran tanaman pangan sebanyak 1dokumen.
 - b) manajemen tanaman pangan selama12 bulan.
 - c) Data dan Informasi Tanaman Pangan sebanyak 3 data.
 - e) laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 4 laporan.

- f) Laporan Koordinasi, Kunjungan Kerja, Asistensi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Manajemen Tanaman Pangan sebanyak 1 laporan.

b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Dana dekonsentrasi yang digunakan untuk melaksanakan program ini bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp515.300.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp515.101.800,00 atau 99,96% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

- a) Pengembangan Kawasan Tanaman Buah seluas 19 Ha.
- b) Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah di 2 Kab/Kota.

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp860.200.000,00 dengan telah realisasi keuangan sebesar Rp858.768.050,00 atau 99,83% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output kegiatan ini adalah:

- a) Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura seluas 4.500 m².
- b) Sekolah Lapang GAP sebanyak 1 kelompok.
- c) Registrasi Lahan Usaha sebanyak 2 lahan usaha.
- d) Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya sebanyak 8 unit.
- d) Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 6 unit.

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.223.408.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.221.585.255,00 atau 99,85% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output kegiatan ini adalah:

- a) Registrasi Lahan Usaha sebanyak 25 Lahan Usaha.
- b) Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya sebanyak 37 unit.
- c) Pengadaan Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 1 unit.
- d) Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran seluas 14 Ha.

4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp2.079.625.000,00 dengan realisasi kegiatan sebesar Rp2.074.336.700,00 atau 99,75% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output yang kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Perbanyak Benih Tanaman Sayur sebanyak 92.250 Kg.
- b) Perbanyak Benih Tanaman Florikultura sebanyak 20.000 benih.
- c) Perbanyak Benih Tanaman Buah sebanyak 34.500 batang.
- d) Penguatan kelembagaan sebanyak 4 lembaga.
- e) Pembinaan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih sebanyak 475 kali.
- f) Pemasyarakatan Benih Bermutu sebanyak 6 kali.
- g) Pengadaan Sarana Prasarana sebanyak 2 unit.
- h) Layanan Perkantoran selama 12 bulan.

5. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.902.605.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp1.900.934.300,00 atau 99,91% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output kegiatan ini adalah:

- a) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebanyak 25 kelompok.
- b) Rekomendasi pedoman adaptasi dan mitigasi iklim sebanyak 4 rekomendasi.
- c) Pembinaan lapangan pengelolaan dan pengendalian opt hortikultura sebanyak 63 kali.
- d) Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan Lab. PHP/ Lab. Agensia Hayati/ Lab. Pestisida sebanyak 4 unit.
- e) Pengembangan Klinik PHT sebanyak 6 unit.
- f) pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan.

6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp526.342.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp526.113.000,00 atau 99,96% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah 3 (lima) output yaitu :

- a) Menyusun laporan penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura sebanyak 4 laporan.
- b) Menyusun laporan penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura sebanyak 2 dokumen.
- c) Lamanya proses pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

c. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan berikut:

1. Pengembangan Mutu dan Standardisasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp313.450.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp73.817.500,00 atau 23,55% dan realisasi fisik sebesar 31,83%. Output yang dihasilkan yaitu :

- a) Pembinaan Laboratorium pengujian dan OKKPD dan Lembaga Sertifikasi (LS) sebanyak 1 unit.
- b) Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebanyak 1 Laporan.
- c) Pengawasan jaminan mutu sebanyak 1 unit.

2. Pengembangan Pemasaran Domestik

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp265.800.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp230.400.700,00 atau 86,68% dan realisasi fisik sebesar 96,08%. Output yang dihasilkan adalah :

- a) Pengembangan informasi pasar sebanyak 1 unit.
- b) laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 3 laporan.

3. Pengembangan Usaha dan Investasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp110.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp110.000.000,00 atau 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output yang kegiatan ini adalah keikutsertaan pada pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 1 kegiatan.

4. Pengembangan Pemasaran Internasional

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp44.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp44.073.000,00 atau 99,04% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output kegiatan ini adalah promosi Kelompok tani/gapoktan yang memasok ke pasar ekspor sebanyak 1 kelompok.

5. Pengembangan Usaha dan Investasi

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp152.325.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp106.776.700,00 atau 70,10% dan realisasi fisik sebesar 75,00%. Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:

- a) Laporan Kegiatan dan Pembinaan sebanyak 5 laporan.
- b) pengembangan Kawasan Agrowisata dan Kawasan Agribisnis sebanyak 2 Lokasi.

6. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp386.600.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp212.563.900,00 atau 54,98% dan realisasi fisik sebesar 75,00%. Output kegiatan adalah laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 2 laporan.

7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp380.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp352.644.500,00 atau 92,68% dan realisasi fisik sebesar 98,50%. Output kegiatan ini adalah laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 12 laporan.

d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Kementerian Pertanian, yang digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan terdiri dari:

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp125.554.000,00 dengan realisasi sebesar Rp91.541.000,00 atau 72,91% dan realisasi fisik sebesar 85,00%. Output kegiatan ini adalah pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan.

2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp2.219.050.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.552.825.000,00 atau 69,98% dan realisasi fisik sebesar 80,00%. Output kegiatan ini adalah:

- a) pendampingan cetak sawah seluas 0,1 Ha.
- b) pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp78.700.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp68.955.000,00 atau 87,62% dan realisasi fisik sebesar 95,00%. Output kegiatan ini adalah pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp11.769.620,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp9.379.784.268,00 atau 79,69% dan realisasi fisik sebesar 85,00%. Output kegiatan ini adalah:

- a) dokumen Operasional Pengembangan, Pengawasan, Dan Kelembagaan Alsintan sebanyak 2 dokumen.
 - b) pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.
5. Fasilitas Pupuk dan Pestisida,
- Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp293.250.000,00 dengan realisasi kegiatan tersebut sebesar Rp288.766.500,00 atau 98,47% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Output kegiatan adalah:
- a) Fasilitas pestisida untuk pertanian sebanyak 1 (satu) paket.
 - b) Penguatan Pendampingan Penyaluran Pupuk sebanyak 1 (satu) paket.
 - c) layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.
6. Pelayanan Pembiayaan Pertanian Dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)
- Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp98.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp61.575.000,00 atau 62,83% dan realisasi fisik sebesar 82,50%. Output kegiatan ini adalah:
- a) Fasilitas Pembiayaan Pertanian sebanyak 1 (satu) paket.
 - b) pelaksanaan layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana Dekonsentrasi yang diterima Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi TA. 2015 bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan total alokasi anggaran sebesar Rp31.273.010.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Rp8.038.181.000,00 bersumber dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar
- Rp7.107.480.000,00 bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar

- Rp9.264.225.000,00 bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP)
- Rp189.295.901.000,00 bersumber dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Secara keseluruhan realisasi penggunaan dana Dekonsentrasi TA. 2015 yang dikelola oleh SKPD/SATKER Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi adalah sebesar Rp12.047.357.780,00 atau 97,23%, dengan realisasi fisik mencapai 98,48%.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Adanya revisi akun, *self blocking* pada RKAKL/DIPA-Online yang menyebabkan proses revisi terhambat serta adanya luncuran dana tambahan untuk pencapaian sasaran *output* dan *outcome* yang bertambah.
- SK Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Program dan Pejabat Teknis agak terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pokok dan pendukung tidak sesuai jadwal sehingga kegiatan menumpuk pada triwulan III dan IV.

b. Solusi

- Percepatan proses revisi akun dan revisi DIPA dengan melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan DJPB, KPPN dan Eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- DIPA diterima tepat waktu yaitu akhir bulan Desember atau awal Januari tahun berjalan.

5.2.2.2 b. Badan Ketahanan Pangan

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program yang diterima yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani

Pada sub kegiatan ini dilakukan pendampingan Gapoktan LDPM Tahap Penumbuhan terhadap tiga gapoktan yang lolos verifikasi dan diberikan dana bansos masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Pedum maupun Juklak yang telah ditetapkan. Selain itu juga dilakukan pembinaan, pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Provinsi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan Gapoktan Penerima Bansos P-LDPM, baik baru maupun yang lama.

2. Jumlah Lumbung Pangan Yang Diberdayakan

Target Lumbung Pangan Tahap Pengembangan yang diberdayakan pada Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam POK, yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Lumbung Pangan, namun sampai dengan 31 Desember 2015, Lumbung Pangan yang lolos verifikasi hanya sebanyak 19 (Sembilan belas) unit Lumbung Pangan. Masing-masing Lumbung Pangan telah menerima dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat. Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan kelompok Lumbung Pangan antara lain:

- a) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi terhadap kelompok Lumbung Pangan tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Sosialisasi dan Pelatihan Administrasi Lumbung, telah dilaksanakan pada tanggal 10 -12 Juni 2015 bertempat di Green House Hotel Jln. M. Yunus Sanis Jelutung Kota Jambi.
- 3. Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok**
- Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a) Panel Harga Pangan Pokok

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Pertemuan coaching Panel Harga pada tanggal 26 Pebruari 2015 bertempat di Aula Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 19 orang. Selain itu telah dilaksanakan pula Pertemuan evaluasi analisis harga pangan pada tanggal 18 November 2015 bertempat di Aula Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 35 Orang.

b) Pemantauan Dalam Rangka UPSUS

Dalam hal ini kegiatan yang telah dilaksanakan yakni sosialisasi dan koordinasi Tim Panel Harga Pangan Tindak Lanjut Permentan 260 Tahun 2015

4. Laporan Pengembangan Model Distribusi dan Cadangan Pangan

a) Jaringan Distribusi Pangan

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pertemuan/rapat tim Tim Jaringan Distribusi setiap 2 bulan sekali serta identifikasi titik pengambilan data.

b. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan

Pembinaan/ pemberdayaan dilaksanakan pada sembilan Desa Mandiri Pangan tahap kemandirian yang tersebar di kabupaten/kota sebagaimana terinci dibawah ini:

- Kabupaten Batang Hari : 1 Desa.
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat : 2 Desa.
- Kabupaten Sarolangun : 1 Desa.
- Kabupaten Merangin : 1 Desa.
- Kabupaten Tebo : 1 Desa.

- Kota Jambi : 1 Desa.
- Kota Sungai Penuh : 2 Desa.

2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

- Dana yang tersedia digunakan untuk mendukung kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada 8 (delapan) lokasi, meliputi provinsi dan 7 Kabupaten/Kota.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan ditingkat provinsi yakni pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat Dalam Analisis SKPG, pada tanggal 7 – 8 Juni 2015 bertempat di Green House Hotel Jln. M . Yunus Sanis Jelutung Kota Jambi.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tingkat kabupaten/kota meliputi; penyusunan laporan SKPG Bulanan, Laporan akhir SKPG, pembayaran honor Tim SKPG, rapat-rapat dan investigasi .

3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / FSVA

Guna tercapainya hasil yang maksimal dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan / FSVA, telah dilaksanakan Pelatihan FSVA pada tanggal 10 - 11 Juni 2015 bertempat di Green House Hotel Jln. M . Yunus Sanis Jelutung Kota Jambi.

4. Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan

Kawasan Mandiri Pangan yang telah diberdayakan melalui Dana Dekonsentrasi yakni sebanyak 1 (satu) kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berlokasi di Kecamatan Betara terdiri atas 5 (lima) desa yakni;

- 1) Kelurahan Mekar Jaya, PPL Pendamping Siti Nurbaya
- 2) Desa Mandala Jaya, PPL Pendamping Kudri
- 3) Desa Makmur Jaya, PPL Pendamping Ahmad Waris
- 4) Desa Bunga Tanjung, PPL Pendamping Mashuri
- 5) Desa Terjun Gajah, PPL Pendamping Romadona.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi; Bintek Pendampingan LKK dan FKK, Penyusunan RUK, Konsolidasi

Pendampingan serta penyusunan laporan kawasan mandiri pangan.

5. Analisis Kerawanan Pangan

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengumpulan data responden, rapat koordinasi sebanyak 3 kali, penyusunan laporan dan mengikuti workshop akhir penanganan kerawanan pangan di tingkat pusat.

6. Kajian Evaluasi Dampak Desa Mandiri Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan. Melalui kerjasama kajian dengan Universitas Jambi diperoleh hasil bahwa secara umum keberadaan Desa Mandiri Pangan cukup berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

7. Analisis Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan

Kegiatan ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1) Analisis Ketersediaan Pangan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan pangan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2014.

2) Analisis Akses Pangan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat persiapan untuk pengumpulan data, pengolahan data analisis akses pangan, pertemuan koordinasi di tingkat provinsi serta penyusunan laporan analisis akses pangan.

8. Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri

Kegiatan yang telah dilaksanakan

- Bintel Kegiatan Usaha dan Penyusunan RUK.
- Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan.

- Apresiasi pendamping, TPD dan LKD Desa Mandiri Pangan.
- Bimtek Pendampingan LKK dan FKK.

c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan peningkatan keamanan pangan segar dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Disamping itu juga untuk meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga. Kegiatan ini meliputi beberapa sub kegiatan antara lain :

1. Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan).

Kegiatan pendampingan P2KP lebih difokuskan untuk mendukung P2KP di kabupaten/kota, sehingga kegiatan ini dapat lebih maju dan berkembang. Melalui kegiatan ini telah disalurkan dana bansos untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan kebun bibit desa sebesar Rp15.000.000 per desa baru Tahun 2015 pada 7 kabupaten/kota sebanyak 26 desa dan bansos untuk Kebun Bibit Desa sebesar Rp3.000.000,00 untuk 28 desa KRPL Tahap Pengembangan (Tahun 2014). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota antara lain; pelatihan pendamping desa, pertemuan kelompok, pembinaan pemantauan serta monitoring dan evaluasi.

2. Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP.

Guna keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2KP maka telah dilaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP oleh tim provinsi, sehingga diharapkan desa P2KP semakin berkembang. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan KRPL di tingkat provinsi pada tanggal 3 – 5 Mei 2015 bertempat di Hotel Nusa Wijaya Jln. Abunjani Simpang IV Sipin Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang.

3. Laporan Promosi P2KP

Telah dilaksanakan kegiatan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang bertujuan untuk mempromosikan percepatan pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan melalui; pembuatan leaflet/poster, recovering baleho konsumsi pangan, mengikuti pameran pada momen-momen tertentu. Pada salah satu pameran yang diikuti pada tahun 2015 yaitu pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat nasional di Palembang Sumatera Selatan yang bertepatan dengan perayaan puncak Hari Pangan Sedunia Tahun 2015, Provinsi Jambi diwakili oleh Kabupaten Batang Hari mendapatkan juara Harapan II pada Lomba Cipta menu tingkat nasional.

4. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bintel Analisis Konsumsi Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas kabupaten/kota dalam menganalisis konsumsi pangan penduduk.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini telah diperoleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Jambi Tahun 2014 sebesar 83,4. Berdasarkan capaian skor PPH tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan pencapaian skor PPH meskipun

tidak signifikan. Beberapa strategi untuk meningkatkan skor PPH akan dilaksanakan melalui pemberdayaan kader pangan dan penyediaan bahan pangan beragam dari hasil pekarangan.

5. Penanganan Keamanan Pangan Segar.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni ;

- Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan segar; bentuk kegiatannya antara lain mengikuti bintek pengawasan keamanan pangan segar di Jawa Barat pada tanggal 27 Juli s/d 1 Agustus 2015, Sertifikasi Profesi Pengawasan Keamanan Pangan Segar 2 s/d 6 Agustus 2015 dan sosialisasi penanganan keamanan pangan segar yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2015 bertempat di Hotel Nusa Wijaya dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang.
- Pengawasan Keamanan Pangan Segar; bentuk kegiatannya yaitu pengambilan sampel pangan segar ke kabupaten/kota dan kemudian dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Pestisida Padang Sumatera Barat. Adapun hasil uji laboratorium dari hasil pengawasan keamanan pangan segar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9

Hasil Pengawasan dan Pemantauan Pangan Segar Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kegiatan Surveillance/Prima 3		Pemantauan		Keterangan
		Jumlah Sampel	Terdeteksi	Jumlah Sampel	Terdeteksi	
1	Kota Jambi	5	2	2	1	
2	Muaro Jambi	6	1	2	1	
3	Batang Hari	-	-	2	1	
4	Tebo	-	-	1	-	
5	Bungo	-	-	2	-	
6	Merangin	6	3	2	1	
7	Sarolangun	1	-	1	-	
8	Kerinci	5	2	1	1	
9	Tanjab Barat	-	-	1	-	
10	Tanjab Timur	-	-	1	-	
11	Kota Sungai Penuh	-	-	2	1	
	JUMLAH	23	8	17	6	

(Sumber data: Badan Ketahanan Pangan, 2016).

- Promosi Keamanan Pangan Segar.

kegiatan promosi keamanan pangan segar ini dilakukan dengan membuat leaflet, poster dan iklan di media elektronik.

d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

Melalui kegiatan ini dilakukan hal – hal berikut:

1. penyiapan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
3. Penyebaran Informasi Ketahanan Pangan melalui media elektronik (Jambi TV)
4. Dukungan Manajemen dan Administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salah satu yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah penilaian terhadap calon penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Pada Tahun 2015 terdapat dua orang penerima APN tingkat nasional pada kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yakni:

1. Sub Kategori Pelaku Produksi; Kelompok Tani Rezki Tani, Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
2. Sub Kategori Pelaku Pengolahan/Industri; Kelompok Wanita Tani Rahma Putri, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

Kedua penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) tersebut telah menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 21 Desember 2015.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Jumlah anggaran dana dekonsentrasi TA. 2015 yang diterima oleh Satker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi secara keseluruhan sebesar Rp5.339.777.000,00 bersumber dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan telah terealisasi sebesar Rp4.500.710.160,00 atau sebesar 84,29 %. Dalam pelaksanaannya Satker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibantu oleh:

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Merangin
3. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi.
6. Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.
7. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjab Barat.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kemerosotan semangat kelompok wanita dalam mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
- Masih ada kelompok KRPL yang belum membenahi AD/ARTnya sehingga pemupukan modal kelompok relatif tidak berjalan.
- Pengelolaan dan peruntukan dana Lembaga Keuangan Desa (LKD) pada masing masing demapan masih menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

- Pendampingan Demapan dilapangan tidak efektif, hal ini terlihat dari kurangnya inisiatif pendamping memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam mengembangkan usaha.
- Gapoktan penerima P-LDPM Tahun 2015 sudah mencairkan dan menggunakan dananya sesuai peruntukan Rencana Usaha Gapoktan (RUG), namun unit usaha belum berjalan maksimal.
- Dari 19 kelompok lumbung yang masuk tahap penumbuhan dan sudah menerima dana bansos sebesar Rp. 20 juta sebagian besar belum menggunakan dana tersebut untuk penyediaan cadangan pangan
- Masih banyak pengurus kelompok lumbung belum memahami bagaimana pengelolaan lumbung tersebut sesuai ketentuan.

b. Solusi

- Pembinaan terhadap kelompok – kelompok penerima bantuan seperti kelompok wanita, kelompok KRPL, Demapan, Gapoktan dan Kelompok Lumbung.
- Berkoordinasi dengan pendamping Demapan agar lebih aktif melakukan pendampingan terhadap kelompok dan mencari terobosan-terobosan baru.

5.2.2.3 Dinas Pendidikan

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

a. Program Pendidikan Dasar

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan berikut:

1. Peningkatan Akses dan mutu PK dan PKLK
2. Pembinaan sekolah Menengah Pertama
3. Pembinaan sekolah Dasar

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya
5. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang Pendidikan dasar .

b. Program Pendidikan Menengah

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut

1. Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

c. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan berikut:

1. Penyediaan layanan kursus dan pelatihan
2. Penyediaan layanan PAUD
3. Penyediaan layanan Pendidikan Masyarakat.
4. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

d. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran dan kerjasama luar negeri

e. Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan berikut:

1. Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIMKAS

2. Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Guru Pendidikan Menengah

f. Program Pendidikan Menengah

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan berikut:

1. Penyediaan dan peningkatan layanan Pendidikan SMA
2. Penyediaan dan Peningkatan layanan Pendidikan SMK
3. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang Pendidikan Menengah.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2015 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi menerima Dana Dekonsentrasi dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp23.686.378.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp14.607.766.000,00 bersumber dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah
- b. Rp5.981.139.000,00 bersumber dari Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
- c. Rp212.612.000,00 bersumber dari Sekretariat Jenderal
- d. Rp1.671.239.000,00 bersumber dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
- e. Rp1.216.622.000,00 bersumber dari Ditjen Pendidikan Menengah

Dalam pelaksanaannya telah terealisasi sebesar Rp21.098.937.804,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp2.587.440.196,00 atau 89,02%.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah realisasi yang tidak optimal akibat perubahan struktur dan nomenklatur di Kementerian

Pendidikan yang mengakibatkan kegiatan terlambat untuk dilaksanakan.

b. Solusi

Melaksanakan kegiatan secara maksimal walaupun waktu pelaksanaan mundur beberapa bulan.

5.2.2.4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Melalui Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Kementerian Perindustrian TA. 2015, Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melaksanakan dua program yaitu:

a. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

1. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Secara fisik program ini telah terealisasi 100% dengan output sebagai berikut:

- a) jumlah produk yang dikembangkan sebanyak 4 produk yaitu produk OVOP di Kota Jambi, Kopi Bubuk, di Kab. Merangin, Kulit Kayu manis di Kab. Kerinci dan Desain Pakaian Batik di Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh
- b) Jumlah sentra yang dikembangkan sebanyak 2 sentra yaitu sentra pengembangan desain kerajinan bambu di Kab. Bungo dan sentra pengolahan sabut kelapa di kab. Tanjab. Barat. Sampai dengan tahun 2015 ini jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi sebanyak 66 sentra dengan tenaga kerja sebanyak 18.445 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rekapitulasi Sentra Industri Kecil dan Menengah

No.	Kabupaten / Kota	Sentra Usaha	TK (orang)
1.	Kab. Batanghari	7	1.674
2.	Kab. Bungo	6	2.172
3.	Kab. Kerinci	8	2.320
4.	Kota Jambi	10	2.654
5.	Kota Sungai Penuh	8	1.785
6.	Kab. Muaro Jambi	4	1.063
7.	Kab. Merangin	4	1.592
8.	Kab. Sarolangun	5	1.988
9.	Kab. Tebo	6	651
10.	Kab. Tanjab Barat	3	997
11.	Kab. Tanjab Timur	5	1.549
JUMLAH		66	18.445

c) Jumlah IKM yang dilatih melalui fasilitasi pengembangan produk, sentra, dan kewirausahaan IKM adalah sebanyak 138 IKM dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembangan produk IKM : 76 IKM
- Pengembangan sentra IKM : 40 IKM
- Pengembangan Kewirausahaan IKM : 22 IKM

d) Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi promosi dan pameran adalah sebanyak 4 IKM yang ikut dalam Pameran Kerajinan di Jakarta pada tanggal 17 s/d 23 Nopember 2015.

b. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Adapun output yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah *Road Map* Industri Agro Unggulan Daerah Sesuai dengan perjanjian kerja antara Pemerintah Provinsi Jambi yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maka dokumen perencanaan berupa *Road Map* Industri Unggulan Daerah berjumlah 1 dokumen yang terfokus pada satu atau lebih (maksimal) 3 komoditi agro yang akan dikembangkan baik

dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Hasil pelaksanaan penyusunan road map industri unggulan daerah di Provinsi Jambi ditetapkan adalah Komoditas Kopi, Minyak Goreng, dan Kulit Manis (*Casiavera*).

a) Industri Hilir Berbasis Kopi Biji

Salah satu komoditas agro unggulan yang memiliki potensi untuk dikembangkan hingga ke sektor hilir di wilayah Provinsi Jambi adalah Komoditas Kopi. Komoditas kopi yang memiliki rentang ketinggian ideal untuk tumbuh yang sangat bervariasi menyebabkan tanaman ini dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi dari dataran rendah Tanjung Jabung hingga dataran tinggi Kerinci. Kopi jenis robusta yang memiliki rentang ketinggian lokasi lebih toleran umumnya diusahakan petani di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sementara jenis kopi arabika lebih banyak ditemui di wilayah dataran tinggi Kerinci.

b) Industri Hilir Berbasis Minyak Kelapa Sawit (CPO)

Komoditas agro unggulan lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan hingga ke sector hilir di wilayah Provinsi Jambi adalah Minyak Sawit (CPO) yang dihasilkan dari proses pemerasan tandan buah segar kelapa sawit. Salah satu komodias hilir yang paling sering dihasilkan dari bahan baku CPO adalah minyak goreng. Sebagaimana yang umum ditemui, komoditas minyak goreng kemasan yang lazim di konsumsi masyarakat adalah produk Minyak Goreng berbahan baku Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Jagung, Kedele dan berbagai komoditas hortikultura berlemak tinggi lainnya. Diantara sejumlah bahan baku minyak goreng yang umum ditemui dipasar tersebut, Kelapa Sawit terbilang cukup banyak ditemui di Provinsi Jambi

c) Industri Hilir Berbasis Kulit Manis

Komoditas agro unggulan lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Jambi karena keunikan dan poptensi peluang pasar yang cukup besar adalah adalah Komoditas Stick. Sejarah perdagangan telah menenmpatkan Indonesia sebagai salah satu produsen kulitmanis (*Cassiavera*) dunia, Thailand dan Vietnam. Varietas yang umum dikembangkan petani produsen di Indonesia adalah *Cinnamomum burmannii*. Data statistic perkebunan Provinsi Jambi menunjukkan pertumbuhan usaha perkebunan yang umumnya masih diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat di Provinsi Jambi telah menunjukkan penurunan sejak tahun 2000'an.

2. Rapat *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *Stakeholder*, Asosiasi dan Dunia Usaha sebanyak 3 kali dengan peserta sebanyak 75 orang.

Selain dari Kementerian Perindustrian, Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi juga mendapatkan dana dekonsentrasi yang bersumber dari Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan program – program berikut:

c. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

1. Kegiatan Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Adapun output kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi terkait kebijakan ekspor dan impor yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 bertempat Aula Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak 40 orang.
- b) Koordinasi pengelolaan ekspor dan impor daerah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015 bertempat Aula Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak 40 orang
- c) Pelatihan fasilitasi PLN yang dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 September 2015 bertempat Hotel Ratu dengan peserta sebanyak 40 orang.

d) Edukasi publik dalam rangka menghadapi MEA yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2015 bertempat Hotel Ratu dengan peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari perusahaan/instansi terkait.

e) Layanan Penerbitan API Online

Penerbitan API sepanjang Tahun 2015 ini sebanyak 14 buah permohonan baru yang terdiri dari 6 API Umum dan 8 API Produsen. Kondisi ini menunjukkan penurunan sebesar 51,58 % bila dibandingkan penerbitan API pada tahun 2014 sebanyak 27 buah. Adapun rincian penerbitan API Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

f) Layanan Penerbitan SKA

Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) diberikan kepada para Eksportir. SKA mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kegiatan ekspor baik untuk meningkatkan daya saing harga melalui pengurangan atau pembebasan bea masuk maupun sebagai syarat diterimanya produk sesuai kesepakatan perdagangan antar Negara.

Jumlah penerbitan SKA sampai dengan akhir Tahun 2015 mencapai 2.184 set atau meningkat sebesar 23,04 % dibandingkan Tahun 2014 yang mencapai 1.775 set. Penerbitan terbanyak berdasarkan Form pada Tahun 2015 adalah : Form D sebanyak 777 set, Form B sebanyak 426 set, Form A sebanyak 261 set, Form E sebanyak 100 set dan Form lain (Form AI, AANZ, AJ, AK, GSTP, IJETA dan IP) sebanyak 620 set. Adapun komoditi yang diekspor antara lain pulp dan tissue, crude coconut (CCD), CPO, crumb rubber, plywood dan ayu olahan, pinang/jahe/kacang dan batubara

Tabel 5.11

Daftar Nama Perusahaan yang telah diterbitkan API Tahun 2015

No.	Jenis API	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Usaha / Bagian
1.	Produsen	PT. ASIA SAWIT LESTARI	Kota Jambi	PKS
2.	Produsen	PT. BRAHMA BINA SAKTI	Kota Jambi	PKS
3.	Produsen	PT. SAWIT SUKSES SEJATI	Kota Jambi	PKS
4.	Umum	PT. SARANA INDAH PERTIWI	Kota Jambi	Bag. VI (HS. No.2801 sd 3826) BAG
5.	Umum	PT. SYURA BAHTERA HARAPAN	Kota Jambi	Bag V (HS. No. 2501 sd 2716)
6.	Produsen	PT. AFRESH INDONESIA	Kota Jambi	Industri AMDK
7.	Produsen	PT. DJAMBI BIO MAS	Kab. Ma, Jambi	Induastri Kayu Bakar
8.	Produsen	PTP. NUSANTARA VI	Kota Jambi	Industri Minyak Kasar
9.	Umum	PT. PATRA ANDALAS SUKSES	Kota Jambi	Bag V (HS. No. 2501 sd 2716)
10.	Umum	CV. RABIUL UTAMA	Kab. Tanjab Barat	Bag II ((HS. No. 0601 sd 1404)
11.	Produsen	PT. PERSADA ALAM USAHA LESTARI	Kab. Sarolangun	Industri Veneer dan Plywood
12.	Produsen	PT. SUKSES GEMILANG PALM	Kab. Sarolangun	Industri Minyak Makan
13.	Umum	CV. RITA MARIO	Kab. Tanjab Barat	Bag V (HS. No. 2501 sd 2716)
14.	Umum	PT. MEDIA NUSANTARA GLOBAL	Kota Jambi	Bag V (HS. No. 2501 sd 2716)

g) Fasilitas Pameran Dalam Daerah

Melalui kegiatan ini telah diikuti 2 kegiatan promosi dalam bentuk partisipasi pameran dalam negeri yaitu Pameran 3rd Indonesia Accessories And Craft Expodi Makasar tanggal 29 – 31 Mei 2015 dengan UKM denganmengikutsertakan 3 UKM dan Pameran Trade Expo Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 – 25 Oktober 2015 dengan mengikutsertakan 2 UKM.

h) UKM Daerah yang mendapat Fasilitas Diklat Ekspor

Sepanjang tahun 2015, UKM Daerah yang mendapat Fasilitas Diklat Ekspor yaitu sebanyak 70 UKM dengan rincian sebagai berikut :

- i. Diklat Pengembangan Produk Pasar Handicraft pada tanggal 14 s/d 18 September 2015 Di Hotel Ratu telah mengikutsertakan sebanyak 40 UKM.
- ii. Diklat Prosedur Ekspor pada tanggal 11 s/d 13 Agustus 2015 di Hotel Ratu telah mengikutsertakan sebanyak 30 UKM.

d. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Realisasi dan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pasar Murah

Kegiatan ini dilaksanakan pada saat menghadapi hari raya Idul Fitri untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan Pasar Murah telah dilaksanakan di 6 lokasi yaitu di Kabupaten Bungo, dan Tanjab Timur, Tebo, Muaro Jambi, Sarolangun dan Batanghari yang bekerjasama dengan Disperindag Kabupaten dan Tim Penggerak PKK setempat. Adapun barang yang diperjualbelikan adalah minyak kemasan dan gula.

2. Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri

Pameran yang diikuti adalah:

- a) Pameran Pangan Nusa (Regional) dan Pameran Produk Dalam Negeri di Lap. Banteng Van Desh Berg Surakarta pada tanggal 5 – 8 Agustus 2015 dengan mengikutsertakan 4 pelaku usaha
- b) Pameran Carnival Adikarya Nusantara di Graha Mandala Siliwangi Bandung pada tanggal 20 - 25 Oktober 2015 dengan mengikutsertakan 2 pelaku usaha
- c) Pameran Pangan Nusa (Nasional) dan Pameran Produk Dalam Negeri di Lap. Banteng Jakarta pada tanggal 5 - 8 Nopember 2015 dengan mengikutsertakan 4 pelaku usaha

3. Layanan Manajemen Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Aktivitas administrasi yang dilakukan untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan dekosentrasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri selama tahun 2015.

4. Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

a) Sosialisasi Pembentukan BPSK pada tanggal 4 Juni 2015 bertempat Di Aula Dinas Perindag Provinsi Jambi. Peserta sosialisasi sebanyak 50 orang yang terdiri dari Dinas Instansi terkait Kab/Kota dan Provinsi Jambi serta calon anggota BPSK. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya BPS bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa antara produsen/pedagang dan konsumen.

b) Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi Bidang Perdagangan pada tanggal 10 Juni 2015 Di Aula Dinas Perindag Provinsi Jambi.. Peserta sosialisasi sebanyak 50 orang yang terdiri dari Dinas Instansi terkait Kota Jambi dan Provinsi Jambi serta pelaku usaha perdagangan baik pengecer maupun konsumen. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang standarisasi perdagangan di Provinsi Jambi.

5. Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi

Pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang/jasa dalam memenuhi standar mutu barang dan jasa. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pengawasan Barang Beredar Ber-SNI Wajib. Pada Tahun 2015 pembagian pengawasan jenis barang ber SNI waji diprioritaskan untuk Provinsi Jambi sebanyakterhadap 3 (enam) jenis Barang antara lain: Mainan anak, pupuk super phospat dan kabel. Pengawasan dilaksanakan di Kab. Tanjab Barat, Tanjab Timur, Bungo, Kerinci, sarolangun dan Merangin.

6. Sosialisasi dan Publikasi Pasar Lelang dan SRG

a) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi mengenai Pasar Lelang dan Undang-undang Resi Gudang yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 April 2015 dan 14 Oktober 2015 bertempat di Aula Dinas Peridag Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak 50 orang tiap kegiatan terdiri dari pelaku usaha (pedagang, Pemilik/pengelola gudang) dan SKPD terkait tingkat Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Jambi.

b) Penyelenggaraan Pasar Lelang Agro

Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga) dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang. Komoditi yang dilelang petani diantaranya kerajinan maupun hasil perkebunan/pertanian yang mereka tanam seperti : alpukat, arang, asam, beras, gambir, kacang, karet, kelapa, kentang, kulit manis, lada, pinang, kopi, kerajinan, kemiri, kue kering, madu, majalah dan buku, madu, sayuran, coklat, gula merah dll. Adapun peserta lelang berasal dari Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi. Nilai transaksi yang dihasilkan sepanjang 5 kali/Edisi pelaksanaan pasar lelang agro pada tahun 2015 dengan total transaksi sebesar Rp. 24.626.311.000,00 dengan rincian sebagai tabel berikut

Tabel 5.12
Jumlah Nilai Transaksi Pasar Lelang Agro
di Provinsi Jambi Tahun 2015

No.	Waktu Pelaksanaan	Nilai Transaksi (Rp)
1.	29 April 2015	3.758.600.000
2.	9 Juni 2015	1.718.554.000
3.	3 September 2015	1.988.325.000
4.	29 Oktober 2015	2.209.600.000
5.	15 Desember 2015	845.000.000
Total		10.520.079.000

Berdasarkan atas nilai transaksi pada tabel di atas terlihat bahwa kinerja pasar lelang ditinjau dari produktivitasnya belum stabil meskipun terjadi peningkatan dalam penyelenggaraannya. Beberapa permasalahan yang ditenggarai sebagai penyebab diantaranya:

1. Keanggotaan pasar lelang yang masih sedikit
2. Penjamin terhadap transaksi perdagangan masih rendah
3. Belum ada kesesuaian antara harga dan kualitas serta jenis komoditi yang dilelang dengan kebutuhan dari pihak pembeli.
4. Pelaksanaan pasar lelang dirasakan sangat tergantung dengan kehadiran pembeli dari luar daerah.

Aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang agro pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 134,09 persen (Rp10.520.079.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp24.626.311.000,00. Adapun data perkembangan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditi agro sejak tahun 6 tahun terakhir (2010-2015) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.13
Transaksi Lelang Agro Jambi 2010-2015

No.	Tahun	Transaksi		
		Jumlah	Realisasi	Persentase
1.	2010	4.399.692.000	4.399.692.000	100,00
2.	2011	25.843.899.468	23.817.649.468	92,16
3.	2012	16.018.180.000	15.963.180.000	99,66
4.	2013	21.447.628.000	21.447.628.000	100,00
5.	2014	24.626.311.000	24.626.311.000	100,00
6.	2015	10.520.079.000	10.520.079.000	100,00
Jumlah		102.855.789.468	100.774.539.468	97,98

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersumber dari dua kementerian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.408.804.410,00 atau sebesar 96.35 persen
- b. Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.681.527.000,00 terealisasi sebesar Rp2.454.844.743,00 atau sebesar 91,55 persen.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Tidak adanya dana subsidi untuk pembelian paket sembako yang akan dijual untuk masyarakat menengah ke bawah pada saat kegiatan pasar murah sangat menyulitkan dalam pelaksanaan operasionalnya. Sehingga dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan ini hanya digunakan untuk biaya operasional di 2 Kabupaten saja yaitu Kab. Muaro Jambi dan Merangin selebihnya tidak dapat digunakan/terrealisasi.
- Belum optimalnya koordinasi program promosi antar instansi/lembaga terkait, Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit untuk memantau/mengevaluasi UKM dalam rangka pengembangan Lebih Lanjut.

- Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang pengelolaan keuangan dana APBN sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan.

b. Solusi

- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan agar kegiatan Pasar Murah ditunjang juga dengan dana subsidi jangan hanya dana operasional saja.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga dengan menyebarkan informasi mengenai pameran dalam negeri maupun luar negeri.
- Perlu Peningkatan pengetahuan Aparatur didalam mengelola dana kegiatan Dekonsentrasi dan Perlu penambahan jumlah SDM yang menguasai Aplikasi melalui Bintek.

5.2.2.5 Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Kementerian Pemuda dan Olahraga pada TA. 2015 memberikan dana dekonsentrasi kepada Satker Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi untuk pelaksanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepemudaan dan Keolahragaan

Kementerian Pemuda dan Olahraga pada TA. 2015 memberikan dana dekonsentrasi kepada Satker Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi untuk pelaksanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Melalui kegiatan ini telah dilakukan pelatihan kewirausahaan kepada 30 orang peserta pada tanggal 15 – 19 Oktober 2015 bertempat di Hotel Mega Indah Kota Jambi serta Pelatihan Wira

Muda Pemula dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang pada tanggal 18 - 19 Sept 2015 bertempat di Hotel Mega Indah Kota Jambi

2. Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda

Melalui kegiatan ini difasilitasi dua angkatan pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) yaitu angkatan XXIV dan angkatan XXV dengan jumlah masing-masing angkatan sebanyak 34 orang. SP3 ini disebar di dua Kabupaten/kota yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Sarolangun. Adapun rincian desa penempatan adalah sebagai berikut:

- a) Kota Sungai Penuh, pada Kecamatan Tanah Kampung (Desa sembilan dan Mekar), Kecamatan Hamparan Rawang (Desa Paling Serumpun dan Larik Kelemahan) dan Kecamatan Kumun Debai (Desa Pinggir Air dan Debai).
- b) Kabupaten Batanghari, pada Kecamatan Pelayung (Desa Jembatan Emas, Lubuk Ruso dan Tebing Tinggi), Kecamatan Mersan (Desa Pematang Gadung, Banteng Rendah dan Sengkati Baru), Kecamatan Maro Sebo Ulu (Desa Kembang Sari, Simpang Sei. Rengas dan Buluh Kasab)
- c) Kabupaten Sarolangun , pada Kecamatan Singkut (Kelurahan Pasar Singkut), Kecamatan Pelawan (Desa Batu Putih), Kecamatan Limun (Desa Pulau Pandan), Kecamatan Cermin Nan Gedang (Desa Kampung Tujuh), Kecamatan Bathin VIII (Desa Tanjung), Kecamatan Pauh (Desa Samara), Kecamatan Mandiingin (Desa Pasar Mandiingin) dan Kecamatan Sarolangun (Desa Bernai)
- d) Kabupaten Merangin, pada Kecamatan Tiang Pumpung (Desa Sekancir Ilir), Kecamatan Bangko Barat (Desa Pulau Rengas dan Bedeng Rejo, Kecamatan Batang Masumai (desa Titian Teras dan Lubuk Baung), Kecamatan Pemenang Induk (Desa Jelatang dan Rejo Sari), Kecamatan Tabir Selatan (Desa Sinar Gading).

3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Jenis kegiatan yang dilakukan adalah:
 - a) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda yang dilaksanakan di Hotel Royal garden pada tanggal 27 – 29 April 2015 dengan peserta sebanyak 45 orang
 - b) Pelatihan untuk Pelatih dan Pembina Paskibraka yang dilaksanakan pada tanggal 06 - 08 April 2015 di Hotel Royal Garden dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
4. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelatihan peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan pada tanggal 30 November – 2 Desember 2015 bertempat di hotel Mega Indah dan diikuti oleh 50 orang peserta.
5. Pengembangan Kepramukaan
Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan Jambore Daerah Jambi pada tanggal 15 – 20 November 2015 bertempat di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayoeti-Musa di Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan diikuti oleh 352 orang peserta
6. Peningkatan wawasan pemuda
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka seleksi, pembekalan dan pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Tahapan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.14
Tahapan kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka Jambore Pemuda Indonesia

No	Jenis Kegiatan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1.	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	50 orang	28 s.d. 30 Juli 2015	Taman Budaya GOS Sungai Kambang
2.	Pembekalan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	16 orang	23 s.d. 25 Okt 2015	Taman Budaya GOS Sungai Kambang
3.	Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	16 orang	26 Okt s.d. 01 Nop 2015	Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau

7. Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

Melalui kegiatan ini telah terfasilitasi 35 orang kontingen Jambi dalam Pekan Paralympic Nasional (PEPARPENAS) VII Tahun 2015 yang berlangsung pada tanggal 9 – 15 Juni 2015 di Bandung, Jawa Barat.

8. Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan

Melalui kegiatan ini telah terfasilitasi 8 orang atlet untuk mengikuti Festival Olahraga Tradisional yang diselenggarakan di Makasar pada tanggal 23 – 26 Oktober 2015. Selain itu juga terfasilitasi 9 orang peserta Festival Senam Kebugaran Jasmani yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 September - 1 Oktober 2015.

9. Pengembangan Sentra Keolahragaan

Kegiatan ini difokuskan pada pengembangan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) baik dalam hal pembinaan atlet maupun fasilitasi dalam kejuaraan yang diikuti. Adapun prestasi yang dihasilkan melalui kegiatan ini pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.

10. Pengembangan Pembibitan Keolahragaan

Melalui kegiatan ini telah diberikan bantuan pembinaan club olahraga junior sebanyak 5 paket dan pengiriman kontingen sebanyak 44 orang untuk mengikuti POPNAS XII Tahun 2015 tanggal 8 – 19 September 2015 di Jawa Barat. Prestasi yang diperoleh pada POPNAS XII ini adalah berupa 5 emas, 9 perak dan 9 perunggu serta menempatkan Provinsi Jambi pada urutan peringkat XIV nasional.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana Dekonsentrasi yang dikelola oleh Satuan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Adapun jumlah dana dekonsentrasi yang diterima adalah

sebesar Rp8.069.455.000,00 dan telah terealisasi fisik sebesar 100.00% dan realisasi keuangan sebesar 95.96%.

Tabel 5.15
Kegiatan dan Prestasi PPLP Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Ket.
1.	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)	45 Orang	Januari s.d Desember 2015	Jambi	
2.	Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Atletik	13 Orang	04 s.d. 08 Mei 2015	Aceh	1 Perunggu
3.	Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Panahan	11 Orang	09 s.d. 13 Mei 2015	Semarang	2 Emas, 3 Perak, 4 Perunggu (Jambi peringkat V)
4.	Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Taekwondo	8 Orang	06 s.d. 10 Agustus 2015	Banten	4 Perunggu
5.	Kejuaraan Nasional Antar PPLP Cabor Gulat	13 Orang	13 s.d. 18 Des 2015	Riau	1 Perak, 2 Perunggu
6.	Tuan Rumah Penyelenggara Kejurnas Antar PPLP Tahun 2014	182 Orang	27 s.d. 31 Juli 2015	Jambi	Jambi Peringkat IV
10.	Penyelenggaraan Kejurnas Judo Antar PPLP Tahun 2015	205 Orang	13 s.d. 17 Oktober 2014	Jambi	3 emas, 2 perak, 1 perunggu
11.	Pembinaan PPLM	7 Orang	Januari s.d Desember 2015	Jambi	
12.	Tes dan Pengukuran Atlet PPLP dan PPLM	52 Orang	25 s.d. 27 Agust 2015	Jambi	

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dana dekonsentrasi yang diterima belum bisa memenuhi kebutuhan operasional pengembangan olahraga.

b. Solusi

Peningkatan anggaran olahraga di tahun yang akan datang.

5.2.2.6 Dinas Kesehatan

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Melalui Dana Dekonsentrasi TA. 2015, Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melaksanakan program – program berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan (100003)

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp3.670.682.000,00 dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan - kegiatan berikut:

1. Pembinaan administrasi kepegawaian
2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara
3. Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan
4. Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji
5. Pengelolaan data dan informasi
6. Pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
7. Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan

b. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Tata laksana Neonatus / Manajemen Asfiksia / BBLR di Kabupaten
Melalui kegiatan ini telah ditingkatkan pengetahuan tenaga kesehatan khususnya Bidan desa dan bidan koordinator dalam tata laksana neonatus/ manajemen asfiksia/ BBLR di kabupaten
2. Pertemuan Pengkajian Kasus Kematian Neonatal (AMP) di Kabupaten / Kota

Melalui pertemuan antara Bidan Desa, Bidan Koordinator dan Pengelola Program Dinas kabupaten /kota maka telah tersusun rencana implementasi dan rencana tindak lanjut AMP

3. Peningkatan Kemampuan Dokter Umum dalam Penanganan Bayi dan Balita Sakit

Melalui kegiatan ini telah terlatih 66 orang tenaga dokter umum puskesmas dari 11 kabupaten/ kota dalam tata laksana bayi dan balita sakit.

4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kelas ibu balita

Melalui kegiatan ini telah terlaksana pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (bidan desa dan bidan koordinator) dari 11 kabupaten/ kota dalam pelaksanaan kelas ibu balita

5. Peningkatan Kapasitas Nakes Puskesmas dalam SDIDTK

Hasil kegiatan ini adalah terlatihnya tenaga kesehatan dalam dalam SDIDTK dan telah tersusun rencana implementasi tentang SDIDTK di Provinsi Jambi

6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Standarisasi MTBS

Melalui kegiatan ini telah dilakukan pelatihan Kapasitas Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Perawat dan Bidan Puskesmas) dalam Standarisasi MTBS sebanyak 2 angkatan di Bapelkes Pijoan Ma. Jambi. Pelatihan dilaksanakan selama 6 (enam) hari efektif.

7. Supervisi dan bimbingan teknis/ program kesehatan anak ke kabupaten

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah rekomendasi dan tindak lanjut program kesehatan anak di dinas kabupaten/kota.

8. Pertemuan koordinasi lintas program dalam penguatan pemanfaatan kohort bayi dan anak balita di 11 kabupaten/kota

Melalui kegiatan ini telah dilatih bidan desa dan bidan koordinator sebanyak 364 orang per kabupaten/ kota.

Pertemuan dilaksanakan selama 2 (dua) hari per kabupaten / kota.

9. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan peduli remaja

Melalui kegiatan ini telah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan peduli remaja (pengelola program kesehatan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Petugas Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas) bertempat di Bapelkes Pijoan Ma. Jambi dengan peserta berjumlah 30 orang selama 5 hari.

10. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan peduli remaja

Melalui kegiatan ini telah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan peduli remaja di Bapelkes Pijoan Ma. Jambi selama 5 hari dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari Pengelola program kesehatan remaja dinas kesehatan kabupaten / kota dan Petugas kesehatan reproduksi di puskesmas

11. Review pelaksanaan antenatal terpadu dan kelas ibu hamil.

Jumlah bidan desa, bidan koordinator, petugas gizi, petugas KIA dan P2 yang telah dilatih adalah sebanyak 86 orang. Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan Continium of care dilakukan sesuai standar, pemberian tablet Fe pada remaja dan pemberian imunisasi TT pada ibu hamil.

12. Pertemuan pengkajian kasus kematian ibu.

Pertemuan ini diikuti Bidan koordinator, Bidan Desa, Kasi KIA, Kabid KIA, SpOG dan SpA. Melalui kegiatan ini dilakukan audit maternal dan neonatal serta pembuatan laporan.

13. Pertemuan Evaluasi PWS-KIA dan pelaksanaan supervisi fasilitatif dan pelaksanaan kelas ibu hamil

Pertemuan ini diikuti oleh bidan koordinasi dan bidan desa di kabupaten/ kota sehingga terjadi peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan PWS-KIA.

14. Pertemuan sistim rujukan maternal dan neonatal

Pertemuan ini diikuti oleh bidan koordinator puskesmas dan rumah sakit dengan hasil dokumen rujukan antara bidan desa ke puskesmas dan dari puskesmas ke rumah sakit.

15. Advokasi pengembangan kemitraan bidan dan dukun dalam pendampingan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas

Kegiatan ini diikuti petugas kesehatan, camat dan PKK dan telah menghasilkan kesepakatan dan MOU antara tentang kemitraan bidan dan dukun.

16. Monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota

Melalui kegiatan ini diperoleh data yang valid mengenai tingkat kesehatan ibu dan tersusun rencana tindak lanjut.

17. Peningkatan tenaga kesehatan puskesmas dalam pelaksanaan kelas ibu hamil

Melalui kegiatan ini telah terlatih 40 orang dari 20 puskesmas mengenai kelas ibu hamil pada pelatihan yang berlangsung selama 3 hari.

18. Peningkatan kapasitas pengelolaan program kab/kota dan pengelolaan program puskesmas dalam pembentukan puskesmas PKRT dan catin

Output yang telah dihasilkan oleh kegiatan ini adalah kesepakatan antara pengelola program tentang program kespro dan catin, terlatihnya tenaga kesehatan sebanyak 44 orang dan tenaga KUA sebanyak 4 orang.

19. Peningkatan kapasitas nakes dalam pelaksanaan ANC terpadu di 6 kabupaten/kota

Pertemuan ANC terpadu ini dilakukan di 6 kabupaten Kota dengan peserta bidan desa dan bidan koordinator. Jumlah masing – masing peserta yang telah dilatih pada 6 kabupaten/ kota tersebut masing- masing sebanyak 50 orang, kecuali Kota Sungai Penuh sebanyak 45 orang.

20. Peningkatan kapasitas pengelolaan program kabupaten/kota dan pengelolaan program puskesmas dalam PPAM kespro dan bencana

Melalui kegiatan ini telah dilatih petugas tenaga kesehatan sebanyak 25 orang selama 3 hari di 3 kabupaten/ kota dengan tujuan meningkatkan pengetahuan petugas nakes dalam pelaksanaan puskesmas PPAM kespro dan bencana

a) a) Output1.

b) b) output 2.

21. Peningkatan kapapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan KB pasca salin

Petugas tenaga kesehatan yang dilatih adalah bidang koordinator sebanyak 22 orang selama 3 hari. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dalam pelaksanaan Kb pasca salin.

22. Orientasi kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan persalinan normal

Melalui kegiatan ini telah dilatih 46 orang bidan koordinator selama 3 hari tentang pelaksanaan persalinan normal.

23. Orientasi pedoman revisi penyelia fasilitatif bagi tim penyelia

Orientasi dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 55 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari pengelola program Dinas Kesehatan, Bidan koordinator, dan Dokter SpOG kabupaten.

24. Orientasi pengenalan tanda bahaya kehamilan persalinan nifas

Orientasi dilaksanakan selama 2 hari dan diikuti oleh tenaga kesehatan sebanyak 64 orang yang terdiri dari pengelola program KIA, Bidan koordinator dan Bidan Desa

25. Pengadaan lembar balik dan kelas ibu

Output kegiatan ini adalah lembar balik kelas ibu sebanyak 243 buah

26. Pengadaan paket alat deteksi resiko ibu hamil

Paket alat yang diberikan kepada bidan desa adalah sebanyak 899 paket.

27. Kesehatan Kerja dan Olahraga

Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan hal – hal sebagai berikut:

a) Orientasi Penyelenggaraan Kesehatan Olahraga, diikuti oleh 38 orang pengelola program kesehatan kerja di Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten serta puskesmas Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Rencana tindak lanjut yang diperoleh dari Orientasi Penyelenggaraan Kesehatan Olahraga adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi program kesehatan olahraga di puskesmas
- Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga
- Sosialisasi pelaksanaan tes kebugaran jasmani metode rockport
- Pelaksanaan upaya kesehatan olahraga di wilayah kerja puskesmas

b) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Bidang Kesehatan Kerja yang diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang pengelola program kesehatan kerja di Dinas Kesehatan dan 2 (dua) orang Kepala Puskesmas dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Rencana tindak lanjut yang diperoleh pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam Bidang Kesehatan Kerja sebagai berikut:

- Penanggulangan dini PTM di tempat kerja (sinergi dir PTM pemetaan tempat kerja di wilayah kerja puskesmas).
- Penilaian resiko di tempat kerja
- Memastikan adanya ruang ASI dan konseling
- Pelayanan kesehatan reproduksi pekerja perempuan
- Edukasi tentang gizi seimbang kepada pekerja
- Penanggulangan dini PTM di tempat kerja (sinergi dir PTM)

- Memastikan ada pengelola kesjaor di puskesmas
 - Adanya jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja di puskesmas
 - Memastikan adanya pos UKK di sektor informal (nelayan)
- c) Pengukuran Kebugaran Jasmani (Kota Jambi, Kab. Sarolangun dan Kab. Tanjab Barat) yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang per kabupaten/kota atau berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang terdiri dari Dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas di lingkungan dinas kesehatan Kota Jambi, Kab. Sarolangun dan Kabupaten Tanjab Barat. Dari pengukuran kebugaran jasmani yang dilaksanakan di:
- Kabupaten Sarolangun sebanyak 50 orang dapat diketahui hasil tingkat kebugaran jasmani kurang 22 orang (44 %), cukup 22 orang (44 %) dan baik 6 orang (12 %) dengan penilaian IMT : Kurus 7 orang (14 %), Normal 29 orang (58 %), Overweight 5 orang (10 %), Pra Obese 7 orang (14 %) dan Obese 2 orang (4 %).
 - Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 50 orang dapat diketahui hasil tingkat kebugaran jasmani kurang sekali 5 orang (10%), kurang 26 orang (52 %), cukup 15 orang (30 %) dan baik 4 orang (8 %) dengan penilaian IMT : Kurus 13 orang (26 %), Normal 19 orang (38 %), Overweight 6 orang (12 %), Pra Obese 9 orang (18 %) dan Obese 3 orang (6 %).
 - Kota Jambi sebanyak 50 orang dapat diketahui hasil tingkat kebugaran jasmani kurang 29 orang (58 %) dan cukup 20 orang (40 %) serta 1 orang tidak melaksanakan tes dengan penilaian IMT : Normal 29 orang (58 %), Pra Obese 16 orang (32 %) dan Obese 5 orang (10 %).
- d) Sosialisasi jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi yang diikuti oleh 52 orang terdiri dari:

- 44 orang dari 11 kabupaten/kota (pengelola program kesehatan kerja, kasubbag kepegawaian, BKD dan RS Pemerintah)
 - 8 orang dari KKP, Subbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, RSD Raden Mattaher Jambi, RSJ Provinsi Jambi, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
- e) Hasil Sosialisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi diperoleh kesepakatan sebagai berikut:
- Mendukung pentingnya keberadaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja melalui sosialisasi kepada semua pihak terkait dalam berbagai kesempatan dan forum khusus tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
 - Melakukan advokasi ke pemerintah daerah provinsi dan kab/kota agar dapat dibuka formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
 - Memetakan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta semua fasilitas pelayanan kesehatan.
 - Melakukan penjangkaran pengelola kesehatan kerja yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, semua fasilitas pelayanan kesehatan, dan SKPD lainnya sebagai calon fungsional pembimbing kesehatan kerja bagi yang memenuhi syarat sesuai Permenpan dan RB Nomor 13 tahun 2013 dan perubahannya. Dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan vertikal dan daerah serta Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi dalam pengangkatan dan penempatan.

f) Pembinaan dan Evaluasi Kesehatan Kerja.

Melalui pembinaan dan evaluasi kesehatan kerja diperoleh rencana target Indikator 2015-2019 Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi serta tersosialisasinya Laporan Bulanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga format terbaru

28. Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer Provinsi Jambi Tahun 2015

Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan hal – hal sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi Yankestradkom Bagi Rumah Sakit Pemerintah yang bertujuan untuk mengetahui hambatan dan permasalahan melaksanakan pelayanan akupuntur di Rumah sakit pemerintah. Rapat ini menghasilkan rencana tindak lanjut pelaksanaan pelayanan akupuntur yang lebih baik.
- b) Rapat Koordinasi Tehnis Yankestradkom dan SP3T Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk mengetahui hambatan dan permasalahan melaksanakan program yankestradkom di kabupaten/kota dan mencari jalan keluarnya. Hasil yang telah diperoleh dari rapat ini adalah rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan program yankestradkom yang lebih baik.
- c) Bintek Yankestradkom ke kabupaten/Kota yang bertujuan untuk membimbing kegiatan program yankestradkom di Kabupaten/kota dan mencari jalan keluar tentang masalah yang ditemukan di lapangan. Hasil bintek yang telah dilaksanakan adalah surat LPD.
- d) JID (jaringan informasi dan dokumentasi) yang bertujuan untuk menggali pengobatan tradisional yang ada di Provinsi Jambi, mendokumentasikan serta menyebarkanluaskannya.
- e) Penapisan Yankestradkom yang bertujuan untuk melindungi dan menggali pengobatan tradisional Provinsi Jambi dengan cara diteliti tingkat keamanannya, manfaat, kesembuhan dibuktikan melalui penelitian agar tidak diklaim orang lain.

Hasil akhirnya adalah tulisan ilmiah hasil penelitian Yankestrakom di Prov Jambi.

c. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan Konsultasi mengenai Pembentukan BPRS Provinsi ke Ditjen Bina Usaha Kesehatanserta melakukan workshop dan rapat persiapan pembentukannya. Workshop diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi, serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

2. *Workshop* Standar Akreditasi Baru / Versi 2012

Pada *workshop* ini telah disampaikan kepada 50 orang peserta yang berasal dari Rumah Sakit Kab/ Kota dan Dinas Kesehatan tentang kebijakan Akreditasi Rumah Sakit sertainstrumen dan parameter yang dipakai dalam penilaian Akreditasi Rumah Sakit.

3. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Setiap rumah sakit wajib melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Melalui kegiatan ini telah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh 11 orang dari RS kab/kota serta 9 orang dari RSUD Kab/kota, RS TNI, RS Polri dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai bentuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit di Provinsi Jambi sehingga didapatkan data yang valid dari masing-masing Rumah Sakit Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Pertemuan Penyusunan e-Planning Program BUK oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes Kab/Kota, RS Prov/Kab/Kota dan Satker lainnya di Wilayah Binaannya.
Melalui kegiatan ini telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh 53 orang berasal dari RSUD Kab/Kota dan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi, serta Labkes Provinsi Jambi.
5. Kegiatan Workshop Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
Workshop ini diikuti oleh dari Rumah Sakit baik kabupaten/ kota maupun provinsi serta Dinas Kesehatan se-Provinsi Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi kejadian yang tidak diharapkan di Rumah Sakit.
6. .Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Lanjutan
Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan suatu kegiatan untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya infeksi, melindungi pasien dari bahaya infeksi akibat tindakan medik, melindungi tenaga medis, tenaga rumah sakit lainnya dan pengunjung rumah sakit dari resiko tertular infeksi, menekan serendah mungkin infeksi nosokomial dan dapat melakukan semua tindakan dengan biaya efektif. Peserta yang hadir pada rapat yang diadakan untuk upaya pengendalian dan pencegahan infeksi lanjutan ini berjumlah sebanyak 49 orang yang berasal dari Rumah Sakit Kabupaten dan Provinsi serta Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Kegiatan Pertemuan Penerapan Standar Asuhan Kebidanan dalam rangka mendukung PONEK di Rumah Sakit
Pertemuan penerapan standar asuhan kebidanan dalam rangka mendukung PONEK di Rumah Sakit ini dihadiri oleh 34 orang yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan RS Provinsi/Kota Jambi.
8. Keterampilan Assesment dan Rencana Terapi Terkait Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Pemberian pelatihan keterampilan dan rencana terapi terkait wajib lapor pecandu narkotika ini diikuti oleh 11 orang peserta

dari 11 puskesmas yang ditunjuk serta 10 orang peserta yang terdiri dari peserta RS Jiwa, BNN, Dinas Kesehatan Provinsi serta Dinas Kesehatan Ma.Jambi.

9. Layanan Perkantoran

Kegiatan ini melayani administrasi yang mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Program pembinaan Upaya Kesehatan Perorangan

d. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PPGD/GELS

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember - 1 Desember 2015 yang diikuti oleh tenaga dokter sebanyak 22 orang dan perawat sebanyak 25 orang berasal Puskesmas yang terletak di perbatasan atau daerah yang rawan kecelakaan dari 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

2. Pertemuan Koordinasi dalam Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 - 23 April 2015 yang diikuti oleh Penanggung Jawab Program, Kasi Yandas, Kabid Yankes dan Kepala Puskesmas.

3. Kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Dalam Rangka Mendukung Yandas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

Sasaran kegiatan ini adalah Suku Anak Dalam dan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 yang dilaksanakan di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun (Desa Bukit Suban sebanyak 75 jiwa dan Desa Pematang Kabau yang dilayani 75 jiwa), Kabupaten Merangin (Desa Margo Jaya 80 jiwa, Desa Pauh Menang 1 sebanyak 52 jiwa, Desa Lantak Seribu sebanyak 62 jiwa, Desa Langling 67 jiwa, Desa Kungkai Seberang 92 jiwa, Desa Mentawak 2 sebanyak 62 jiwa, Desa Sinar Gading 57 jiwa) , Tanjung Jabung Barat (Desa Rantau

Badak), Tanjung Jabung Timur (Desa Air Hitam Laut) dan Kabupaten Batang Hari (Desa Bungku yang dilayani sebanyak 150 jiwa).

4. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pendamping Akreditasi Fasyankes

Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 7 – 17 September 2015 di Jambi dan diikuti oleh 36 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Puskesmas yang merupakan Tim Pendamping Akreditasi Fasyankes Kabupaten dan Provinsi.

5. Workshop penguatan pembinaan Manajemen Puskesmas

Kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2015 di Bapelkes Jambi dan diikuti 67 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Puskesmas.

e. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1. Penyakit DBD

Kejadian kasus DBD yang cukup tinggi dan masih terjadi kematian akibat DBD merupakan permasalahan yang cukup memprihatinkan semua pihak. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui alokasi anggaran dana dekosentrasi untuk pengendalian DBD tahun 2015 sebesar Rp90.450.000,00 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bintel dan Monitoring Pengendalian Arbovirosis
- b) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pokjanal DBD
- c) Workshop Petugas Pengelola Program Arbovirosis

Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Jambi tahun 2015 terdistribusi di 10 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo serta Kerinci). Dari 10 Kabupaten/Kota tersebut, Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi (s/d Desember = 794 kasus, dengan 08 kematian), kondisi ini sesuai dengan *pattern of disease* dari

penyakit DBD, yaitu Urban Disease. Selanjutnya Kabupaten lainnya yang juga terjadi peningkatan kasus adalah Kota Jambi, Batang Hari dan Bungo, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16
Distribusi penderita dan kematian DBD
menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015

KABUPATEN/KOTA	TOTAL		IR per 100 ribu pddk	CFR (%)
	P	M		
KOTA JAMBI	430	8	73,2	1,9
BATANG HARI	77	0	28,9	0,0
MUARO JAMBI	48	0	12,7	0,0
TANJAB BARAT	54	0	17,6	0,0
TANJAB TIMUR	30	0	13,2	0,0
B U N G O	70	0	20,9	0,0
T E B O	0	0	0,0	0,0
SAROLANGUN	32	0	11,8	0,0
MERANGIN	33	0	9,0	0,0
KERINCI	9	0	3,6	0,0
KOTA SUNGAI PENUH	11	0	12,16	0,0
PROV TAHUN 2014	794	14	23,3	1,0

Keterangan :

P = Penderita; IR = Incidence Rate per 100.000 penduduk

M = Kematian CFR = Case Fatality Rate (%)

2. Peningkatan Pengendalian Malaria

Secara nasional tujuan pengendalian malaria untuk wilayah Sumatera ditargetkan menuju eliminasi pada tahun 2020. Catatan penting terkait tahapan menuju eliminasi malaria adalah bahwa yang menjadi salah satu indikator bebas malaria adalah angka kejadian kasus malaria positif tahunan per 1000 penduduk beresiko (*Annual Parasite Incidence/API*).

Melalui alokasi anggaran dana dekosentrasi tahun 2015 untuk pengendalian malaria sebesar Rp189.670.000.- telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- a) Monitoring dan Evaluasi P2 Malaria menuju Eliminasi Malaria
- b) Pelatihan Pengembangan E-SISMAL

- c) Pertemuan Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor/ Lintas Program Kemitraan (Forum Gebrak Malaria Daerah) dan Kemandirian Masyarakat
- d) Peningkatan dan Penguatan Mutu Pengobatan dan Laboratorium Malaria

Pada tahun 2015 cakupan *Annual Parasite Incidence* (API) di Provinsi Jambi adalah sebesar 0,44 per 1000 penduduk dan 3 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan RI. Secara bertahap seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi sampai akhir 2019 ditargetkan akan eliminasi. Capaian kinerja pengendalian malaria per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.17
Capaian kinerja Program Pengendalian Malaria
menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015

Kabupaten/Kota	% kasus diobati ACT	% kasus klinis dikonfirmasi Lab	API (per 1000 penduduk)	Slide Positivity Rate (Proporsi slid +)
Kota Jambi	100.00	100.00	0,47	3,90
Batang Hari	98.00	94,00	0,71	3,75
Muaro Jambi	100.00	100,00	0,23	1,34
Tanjab Barat	100,00	91,00	0,27	11,55
Tanjab Timur	57,00	76,00	0,03	9,86
Merangin	98,00	92,00	0,94	6,69
Sarolangun	100,00	55,00	0,46	12,09
Bungo	98,00	69,00	0,25	5,31
Tebo	100,00	87,00	0,92	16,13
Kota Sei.Penuh	0,00	00,00	0,00	0,00
Kerinci	0,00	00,00	0,00	0,00
JAMBI	99,00	91,00	0,44	5,15

Keterangan :

% ACT = Persentase penderita malaria diberikan obat anti malaria
ACT (*Artemisinin based Combination Therapy*)

% LAB = Persentase kasus klinis malaria dikonfirmasi secara laboratorium

API = Annual Parasite Incidence (indikator kejadian malaria)

SPR = Slide Positivity Rate (Proporsi sediaan positif dari yang diperiksa)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa permasalahan bahwa belum semua kunjungan klinis malaria di fasilitas pelayanan kesehatan dikonfirmasi secara laboratorium (91%) dan dari sediaan darah yang diperiksa 5,15% positif malaria (target SPR = <5%) dan belum semua (99,00%) kasus malaria positif diberikan obat anti malaria ACT.

3. Eliminasi Filariasis dan Kecacingan

Di Provinsi Jambi saat ini terdapat 4 kabupaten yang termasuk daerah endemis *Filaria* yaitu daerah dengan angka *Mikrofilaria* diatas 1%, yaitu Kab. Ma. Jambi, Tanjab Timur, Batanghari dan Merangin. Pengobatan Massal Filariasis ini dimulai tahun 2012 dan berlangsung selama 5 tahun berturut-turut dan akan berakhir tahun 2016 yang akan datang.

Target pengobatan massal Filariasis ini adalah 65% dari jumlah penduduk selama 5 tahun berturut-turut, dimana setelah selesai pengobatan massal akan dilakukan survei kembali untuk melihat apakah masih ada penularan baru dari Filariasis tersebut. Dalam dua kali pengobatan massal yang dilakukan, target sasaran pengobatan massal Filariasis jauh melampaui target (65% dari jumlah penduduk), lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sampai saat ini pelaksanaan pengobatan massal Filariasis belum menemukan kendala, karena sebagian besar dana pelaksanaan ditanggung oleh Donor (RTI/USAID). Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2015 melalui dana dekosentrasi untuk pengurangan Filariasis dan Kecacingan tahun 2015 sebesar Rp55.530.000,00 adalah advokasi/ Sosialisasi/ Koordinasi POMP Filariasis.

4. Kegiatan Pengendalian Zoonosis

Kasus Zoonosis yang ditemui di Provinsi Jambi hanya penyakit Rabies. Sampai bulan November tahun 2015 terjadi kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) sebanyak 681 kasus dengan 1 kasus GHPR yang mengakibatkan kematian.

Alokasi anggaran dana dekosentrasi untuk pengendalian Zoonosis tahun 2015 adalah sebesar Rp34.250.000,00 dengan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Advokasi Pengendalian Penyakit Rabies
2. Bimtek dan Monitoring serta koordinasi Pengendalian Penyakit Zoonosis

5. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV/AIDS

Alokasi anggaran dana dekosentrasi TA. 2015 untuk pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV/ AIDS tahun 2015 adalah sebesar Rp23.053.000.00. Melalui anggaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Konseling dan Tes (KT) yang diikuti oleh 33 orang dari 11 Kabupaten/ Kota (Dokter, Perawat dan Petugas Laboratorium).

6. Pengendalian Tuberkulosis

Alokasi anggaran dana dekosentrasi untuk pengendalian tuberkulosis tahun 2015 adalah sebesar Rp52.725.000,00 dan telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan berikut:

- a) Monitoring dan Evaluasi P2TB
- b) Belanja Bahan Penunjang Operasional

7. Penanggulangan Penyakit Kusta

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penanggulangan penyakit Kusta Anggaran dana dekosentrasi untuk program Kusta dan Frambusia tahun 2015 sebesar Rp49.280.000,00 adalah :

- a) School Survey Penyakit menular kusta

- b) Pembinaan Teknis Program P2 Kusta
- c) Kontak Survey Penyakit menular kusta

8. Penanggulangan Penyakit ISPA

Dari hasil Riskesdas tahun 2007 penyakit Pneumonia balita merupakan penyakit penyebab kematian kedua terbesar setelah penyakit Diare. Penemuan penderita Pneumonia balita di Provinsi Jambi masih rendah dimana padatahun 2014 cakupan mencapai 17% sedangkan tahun 2015 sampai bulan November baru mencapai 14,54%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 menggunakan dana dekosentrasi sebesar Rp87.600.000,00 adalah sebagai berikut:

- a) Pertemuan Manajemen Tatalaksana Penyakit Pneumonia Balita
- b) Supervisi Program ISPA ke Kabupaten/ Kota

Adapun kendala dalam pencapaian cakupan penemuan dini penderita Pneumonia adalah

- a) Belum semua puskesmas melaksanakan MTBS dalam menegakkan diagnosa balita.
- b) Petugas tidak menghitung napas penderita balita dengan batuk pilek

9. Kegiatan Penanggulangan Penyakit Diare dan Hepatitis

Alokasi anggaran bersumber dana dekonsentrasi TA 2015 sebesar Rp85.155.000,00 yang diterima telah dipergunakan untuk melaksanakan:

- a) Advokasi dan Sosialisasi tentang Diare dan LROA
- b) Peningkatan Kapasitas Petugas LROA
- c) Pengadaan LROA Kit
- d) Pelatihan Petugas Deteksi Dini Penyakit Hepatitis pada Ibu Hamil dan Tenaga Kesehatan
- e) Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksana Pemantauan Hepatitis

10. Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Provinsi Jambi mulai dilaksanakan pada tahun 2012. Pada tahun 2015 pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan alokasi anggaran dana dekonsentrasi sebesar Rp1.962.115,00 dan telah dipergunakan untuk:

- a) Peningkatan kapasitas petugas pelaksana POSBINDU PTM
- b) Penguatan jejaring PPTM dan Advokasi
- c) Workshop rencana kerja pengendalian PTM
- d) Surveilans PTM
- e) Monitoring Faktor Risiko PTM
- f) Pengembangan SDM Pengendalian Kanker
- g) Pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim
- h) Pembinaan Program PPTM
- i) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (Dokter dan Perawat dalam pengendalian PTM terintegrasi)
- j) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam surveilans faktor risiko PTM
- k) Pengadaan Bahan Penunjang Program PPTM
- l) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya berhenti merokok
- m) Pelatihan petugas dalam penerapan KTR

f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Total Anggaran program Farmasi dan alat Kesehatan adalah sebesar Rp3.183.467.000,00 dan telah terealisasi keuangan sebesar Rp3.012.818.800,00 atau (94,6%), dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Pada tahun 2015 Dinas kesehatan Provinsi Jambi mendapatkan dana dekonsentrasi bersumber dari Menteri Kesehatan RI sebesar Rp21.575.347.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.034.160.040

(74,32%). Kecilnya penyerapan ini disebabkan pada bulan Agustus terjadi revisi DIPA efisiensi dan baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober. Sehingga 3 bulan menjelang revisi DIPA selesai, program/ kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Adanya efisiensi DIPA menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
- Khusus pelayanan terkait HIV/ AIDS masih terdapat masalah belum meratanya layanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan terkait HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual, ketersediaan kondom dilayanan kesehatan yang terbatas dan masih ditemukan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang lolos follow up pengobatan ARV

b. Solusi

1. Mengupayakan agar program/ kegiatan yang dibatalkan bukan merupakan program/ kegiatan prioritas
2. Diharapkan layanan kesehatan melengkapi SDM sesuai dengan standart yang ada dalam program pengendalian HIV/AIDS.
 - Layanan IMS diperlukan tenaga dokter, bidan, laboratorium dan RR
 - Layanan Konseling dan Tes HIV diperlukan tenaga medis dan paramedis, laboratorium.
 - Layanan PDP diperlukan tenaga dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, farmasi dan RR.
 - Layanan PPIA diperlukan dokter spesialis obgins dan anak, bidan dan RR.
3. Setiap kabupaten/kota diharapkan menyediakan kondom di layanan kesehatan terkait HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
4. Kerjasama lintas sektor (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) dalam upaya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan

kelompok masyarakat peduli AIDS (LSM) sebagai pendamping ODHA untuk mencegah lolos follow up pengobatan ARV.

5.2.2.7 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program yang dilaksanakan oleh Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program ini adalah bimbingan teknis dan Supervisi Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jambi sesuai dengan DIPA – SKPD Bidang Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat dan BPMPP.

b. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah kegiatan penguatan kelembagaan PUG di Provinsi. Melalui kegiatan ini telah dilakukan pembentukan Tim Pelaksana kegiatan, pelatihan layanan konseling, teknik komunikasi dan strategi KIE terkait P2TP2A, pelatihan pencatatan dan laporan, teknik pendampingan hukum dan peran advokat terkait P2TP2A dengan sasaran Pengelola P2TP2A, melakukan jejaring P2TP2A kabupaten/kota/Provinsi Jambi dengan cara mekanisme koordinasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan standar pelayanan, menerapkan standar pelayanan kesehatan bagi perempuan anak korban kekerasan, kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Jambi, peran Polda dalam penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak sebagai jejaring kerja P2TP2A, Penguatan kelembagaan P2TP2A dalam perencanaan daerah, serta melakukan lokasi pemetaan di 9 kabupaten 2 kota di Provinsi Jambi.

c. Program Perlindungan anak penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak di provinsi

Kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:.

1. Persiapan Pertemuan Survey Akta Kelahiran Bagi anak di Bappeda Provinsi Jambi
2. Pertemuan hasil survey akta kelahiran oleh pihak Perguruan Tinggi/ Unja (pusat Penelitian Gender) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2015 di Hotel Novita Jambi
3. Forum Koordinasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Jumlah Peserta 75 orang yang dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Desember 2015.
4. Pengumpulan data implementasi hak asasi manusia di Provinsi Jambi terkait dengan Polda Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan bersumber dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesiadan Deputi perlindungan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI. Total anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp26.073.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp25.559.950.000,00
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp514.000.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum permasalahan berkaitan dengan mekanisme administrasi/ dasar hukum penyelenggaraan dan jumlah fasilitasi yang tidak sesuai target, sehingga penyerapan dana menjadi kecil dan tidak sesuai dengan pagu anggaran yang di rencanakan

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran/program/kegiatan adalah berupaya semaksimal mungkin agar program/kegiatan dapat terealisasi.

5.2.2.8 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Dana dekonsentrasi TA. 2015 yang diterima oleh Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Kementerian Tenaga KerjaRI.Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemensos

Program ini bersumber dari Kementerian Sosial RI dengan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah perencanaan dan penganggaran dengan output 4 dokumen serta kegiatan penyuluhan sosial dengan output 6 laporan pelaksanaan penyuluhan.

b. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini bersumber dari Kementerian Sosial RI dengan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

5. Kegiatan Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

Output yang telah tercapai dari kegiatan ini antara lain keikutsertaan 460 orang dalam kegiatan kesetiakawanan sosial, dan penanggulangan kemiskinan perdesaan pada 140 KUBE dan 31 orang.

6. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Sasaran dan kelompok sasaran yang telah diberdayakan adalah 60 KK, 188 orang, 60 organisasi sosial, 45 karang taruna, 10 desa dan 12 forum CSR.

7. Pemberdayaan Komunitas Terpencil (KAT)

8. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dengan kelompok sasaran 500 KK dan 14 orang.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada program yang bersumber dari Kementerian Sosial ini adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, dengan sasaran 110 orang
2. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, dengan sasaran 355 orang
3. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dengan sasaran 20 orang
4. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, dengan sasaran 1270 orang
5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia, dengan sasaran 450 orang

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini bersumber dari Kementerian Sosial dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
3. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
4. Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan)
5. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
6. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

e. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program ini bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan, bertempat di 1 lokasi dan melibatkan 41 orang
2. Penempatan tenaga kerja dalam negeri, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 20 orang
3. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri, dengan sasaran tenaga kerja sebanyak 20 orang
4. Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja, dengan sasaran 60 orang
5. Peningkatan pengembangan pasar kerja, yang dilaksanakan di 12 lokasi
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPTK

f. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program ini bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
2. Peningkatan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja

3. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial
4. Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

g. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Program ini bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan pemberdayaan kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalatas
2. Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Binalatas
3. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan luar negeri Binalatas
5. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalatas
6. Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program pelatihan Binalatas

h. Program Perlindungan tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan

Program ini bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan
2. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak

3. Peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PPK

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Pada tahun Anggaran 2015 telah dialokasikan dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan total sebesar Rp33.195.155.000,00, dengan rincian :

- a. Kementerian Sosial RI sebesar Rp15.967.586.000,00
- b. Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp17.227.569.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ditemui permasalahan dalam pelaksanaan program/ kegiatan.

5.2.2.9 Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

a. Program Pemberdayaan Koperasi

Program yang dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat – rapat Koordinasi Pemberdayaan KUMKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.609.381.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.311.019.000,00 atau 81,46 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya rapat – rapat koordinasi antara daerah dan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pendataan Koperasi dan UMKM.
2. Pameran Produk KUMKM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp660.305.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp648.720.000,00 atau 98,25 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pameran Hari Koperasi Nasional Ekspo

2015 di Sumatera Utara, terlaksananya Pameran SME Tower di Jakarta, terlaksananya Pasar Rakyat sebanyak 2 kali dan terlaksananya ekspose produk unggulan melalui display permanen dan transaksi penjualan di tower SME Jakarta.

3. Evaluasi dan Laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.386.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp197.034.400,00 atau 99,32 %. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah dokumen laporan Koperasi dan UMKM.
4. Operasionalisasi pemberian izin usaha mikro dan kecil (IUMK) di Provinsi Jambidengan alokasi anggaran sebesar Rp669.050.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp154.804.000,00 atau 23,14 %.
5. Pelatihan pengembangan KUKM dalam menghadapi MEA Provinsi Jambi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp366.212.000,00 atau 24,41 %
6. Magang Wirausaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp581.947.000,00 atau 83,14 %
7. Operasional Pusat Layanan Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi Jambi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp663.645.600,00 atau 94,81 %
8. Pengawasan dan pengendalian usaha simpan pinjam koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp337.208.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp319.797.000,00 atau 95,09 %
9. Pemberdayaan petugas penyuluh koperasi lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp454.420.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp454.420.000,00 atau 100 %.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana dekonsentrasi TA 2015 yang diterima oleh Satker Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi adalah sebesar sebesar Rp6.827.847.000,00 bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia pembina koperasi dan UMKM yang berdampak pada tidak mengalirnya data secara rutin dari Kabupaten/Kota ke Provinsi
- Masih terbatasnya dana pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM baik yang bersumber dari dana APBN maupun dana APBD I dan APBD II.
- Kurang optimalnya koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta.
- Rendahnya citra / image dan rasa memiliki masyarakat terhadap Koperasi
- Terbatasnya kualitas dan minimnya SDM aparat pembina yang menguasai aspek perkoperasian dan jiwa entrepreneurship dalam mengembangkan UMKM.
- Masih rendahnya SDM Pengurus/pengelola Koperasi yang mampu mengelola Koperasi secara optimal, antara lain disebabkan karena pergantian pengurus yang tidak diimbangi dengan kesiapan proses alih manajemen.
- Rendahnya tingkat kesadaran pengurus Koperasi untuk melaksanakan eksternal audit oleh Akuntan Publik.
- Rendahnya tingkat pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) oleh Koperasi.
- Jumlah Koperasi tidak aktif di Provinsi Jambi relatif besar yaitu sekitar 38,09 % dari total jumlah Koperasi.
- Masih rendahnya minat kelompok-kelompok ekonomi produktif yang ada di tengah masyarakat (seperti : KUBE (Kelompok usaha bersama), Kelompok Tani, UPPKS, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), majelis taklim

dsbnya) berintegrasi ke dalam wadah Koperasi atau membentuk wadah Koperasi.

- Belum tertatanya administrasi pembukuan dana bantuan perkuatan (bankuat) dari Kementerian Koperasi dan UKM secara baik.
- Terbatasnya kemampuan daya inovasi dan kreativitas aparat pembina dan gerakan Koperasi dalam bidang perkoperasian dan interpreneurship.
- Kurang efektif dan fokusnya usaha yang dilakukan oleh Koperasi yang bersifat banyak usaha (multi purpose),
- Rendahnya kemampuan Koperasi dalam menggali potensi pasar baik lokal, regional, nasional dan International.
- Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memenuhi permintaan pasar (baik kapasitas, kualitas, kontinuitas dan harga yang mampu bersaing).
- Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam menggunakan dan memanfaatkan IT.
- Rendahnya kompetensi wirausaha Koperasi dan UMKM
- Terbatasnya akses sumberdaya produktif Koperasi dan UMKM.
- Kurang kondusifnya iklim usaha Koperasi dan UMKM.
- Bla bla bla.

b. Solusi

- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat pembina koperasi dan UMKM.
- Perlu adanya forum Rapat Koordinasi antar stake holder tentang pemahaman dan kepedulian serta adanya komitmen Dinas/Instansi dan lembaga terkait terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi.

- Perlu dibentuknya suatu forum komunikasi yang intensif yang mengakar dari bawah sehingga diharapkan dapat merubah citra / image dan rasa memiliki masyarakat terhadap Koperasi semakin tinggi.
- Perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan merekrut kembali pegawai yang berasal dari eks Kanwil/Kandep Koperasi, serta mengikutsertakan pegawai baru dalam setiap kegiatan pelatihan di Provinsi maupun di Pusat.
- Perlu adanya pelatihan yang terpadu didalam menunjang kualitas SDM Gerakan Koperasi dan UMKM Kab/Kota.
- Perlu meningkatkan SDM Pengurus koperasi melalui pelatihan dan meningkatkan kesadaran pengurus bahwa lembaga koperasi merupakan milik bersama dari anggota untuk anggota dan oleh anggota koperasi.
- Perlu adanya sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada Pengurus Koperasi tentang artinya pelaksanaan audit eksternal dan menganggarkan biaya untuk audit eksternal
- Perlu adanya sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada anggota Koperasi tentang artinya pelaksanaan RAT pada hakekatnya RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi guna mengevaluasi, merencanakan dan mengimplementasikan hasil RAT.
- Perlu meningkatkan pembinaan dengan mengembangkan usaha produktif anggota yang nantinya dapat dipasarkan melalui koperasi.
- Perlu meningkatkan koordinasi antar instansi agar kelompok – kelompok binaannya terwadah dalam lembaga koperasi dan bersama – sama untuk mengembangkan usaha.

- Perlu ada pelatihan administrasi pembukuan sehingga format laporan setiap koperasi itu sama.
- Perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengikutsertakan study banding/magang kepada aparat pembina dan pengurus koperasi ke koperasi yang lebih baik.
- Perlu memberi pemahaman kepada pengurus koperasi agar menentukan skala prioritas usaha terutama untuk kepentingan anggota.
- Perlu adanya tenaga pendampingan yang profesional dalam mengakses pemasaran hasil produk Koperasi dan UMKM atau membentuk suatu wadah atau tempat sebagai pusat promosi hasil produk Koperasi dan UMKM yang sumber pendanaannya diharapkan dapat dialokasikan melalui dana dekon dan APBD I.
- Perlu meningkatkan pengetahuan pengurus terhadap kemajuan teknologi sehingga informasi dalam memenuhi kebutuhan pasar dapat diketahui secara dini.

5.2.2.10 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program/ kegiatan yang diterima dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta BPKAD dibawah koordinasi Biro Pemerintahan. Adapun program/ kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dalam rangka Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota

1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban.
Melalui kegiatan ini telah diselenggarakan rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam mewujudkan ketentraman

dan ketertiban di wilayah Provinsi pada tanggal 2 Desember 2015 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan dibuka langsung oleh Pj. Gubernur Jambi. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban di kab/kota dan kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi, serta telah dilakukan pula monitoring dan evaluasi kondisi ketentraman dan ketertiban di Kab/Kota dan kecamatan dalam wilayahnya.

2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Provinsi

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tugas instansi vertikal di wilayah provinsi pada tanggal 1 Oktober 2015 di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambidengan mengangkat isu-isu terkait penyelenggaraan pemerintahan umum. Selain itu dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum di Kabupaten/Kota dan di Kecamatan.

3. Kegiatan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan meningkatkan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan dana-dana APBN yang ada di wilayah Provinsi. Adapun rapat Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015 di Ruang Dara Jingga Bappeda Provinsi Jambi.

4. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Wilayah Provinsi.

Subkegiatan yang telah dilakukan adalah koordinasi pengendalian pelaksanaan dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi dan Kab/Kota melalui rapat koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Wilayah Provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian/LPNK di Provinsi dan Kab/Kota. Rapat Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi pada tanggal 28 - 29 September 2015 di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi.

5. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Toponimi dan Batas Daerah

Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 16 September 2015, 18 - 20 Oktober 2015 dan tanggal 21 s.d 23 Oktober 2015. Melalui rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota ini diharapkan terjadi percepatan penyelesaian penegasan batas daerah antar Provinsi, Kabupaten/Kota secara pasti di lapangan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

6. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah

Rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Rapat Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama daerah sebanyak 2 kali yaitu tanggal 9 November 2015 dan 15 Desember 2015.

- b) Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) untuk penguatan dan pengembangan kerjasama daerah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 Oktober 2015, 3 November 2015 dan 8 Desember 2015.

Melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah terfasilitasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kerjasama antar daerah sehingga akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah sosialisasi berbagai regulasi terkait kerjasama daerah, peningkatan peran Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kerjasama daerah oleh Kab/Kota diwilayahnya, serta terfasilitasinya tata kelola administrasi kerjasama daerah.

b. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, meliputi:
 - a) Penyusunan laporan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan provinsi;
 - b) Koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan;
 - c) Perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran;
 - d) Pengelolaan akuntansi administrasi kependudukan;
 - e) Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f) Pembinaan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) Penyusunan data kependudukan provinsi; dan
 - h) Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di Kabupaten/kota

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tertib database Kependudukan Berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen Kependudukan, Terwujudnya Pemberian NIK Pada Setiap Penduduk, Koneksitas NIK dengan Identitas Kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang Administrasi Kependudukan.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Alokasi Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh bersumber dari dua direktorat jendel pada Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.316.579.000,00
- b. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp4.073.912.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Adanya perubahan nomenklatur pada Kementerian Dalam Negeri dari Ditjen Pemerintahan Umum menjadi Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan yang menyebabkan revisi pada program kegiatan sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan September 2015.
- DIPA APBN-P baru diterima oleh Satker pada bulan Juni atau pada awal Semester II, sehingga dengan rentang waktu yang pendek menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana tidak bisa dioptimalkan.
- Adanya surat edaran Menpan yang tidak memperbolehkan kegiatan rapat diselenggarakan di hotel, sehingga beberapa kegiatan perlu dilakukan revisi.

b. Solusi

- Optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan rapat koordinasi di gedung – gedung pemerintah

5.2.2.11 *Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi*

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

a. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi yang diterima pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi, maka program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) diharapkan akan menghasilkan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan oleh organisasi/SKPD, sehingga dapat mewujudkan diklat yang tepat sasaran, tepat isi kurikulum dan tepat strategi untuk mencapai tujuan. Melalui kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat, maka idealnya setiap program yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan.

Hasil yang didapatkan melalui Identifikasi Kebutuhan Diklat adalah memperjelas kaitan antara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja lembaga yang merupakan akumulasi dari kinerja para pejabat di dalam suatu organisasi, disebutkan demikian karena setiap pejabat yang dilengkapi dengan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan, selanjutnya akan dapat melaksanakan setiap rincian tugas dalam jabatannya.

2. Rapat Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan

Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka pemberian pembinaan kepada pengelola Aparatur adalah melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Kediklatan bagi Pengelola Kediklatan Aparatur baik yang ada di Pemerintahan Provinsi Jambi, maupun di Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Dengan terlaksananya Rapat Koordinasi ini maka akan terjadi peningkatan koordinasi penyelenggaraan Diklat baik ditingkat

provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan secara efektif dan saling melengkapi. Dengan demikian, tanggung jawab reformasi kediklatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi, namun menjadi tanggung jawab bersama antara lain didalamnya Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Anggaran yang diterima adalah sebesar Rp155.096.000,00 yang bersumber dari Badan Diklat (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian Dalam Negeri RI.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum program dan kegiatan yang didanai dengan anggaran dekonsentrasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi dapat terlaksana, walaupun terlambat. Keterlambatan ini diakibatkan oleh penerimaan DIPA yang terlambat akibat perubahan nomenklatur Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

5.2.2.12 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi Di

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Anggaran untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian RI sebesar Rp13.523.364.000,00. Dengan realisasi fisik sebesar 98 % dan realisasi keuangan sebesar 95,06 %. Tujuan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian adalah untuk memfasilitasi pengembangan SDM Pertanian dan untuk

meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan dan kelembagaan Petani. Selain itu juga bertujuan untuk memenuhi sasaran kegiatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai, melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui dana dekosentrasi secara tertib administrasi dan teknis, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian antara pusat dan daerah. Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian meliputi:

1. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Kelembagaan Penyuluhan yang difasilitasi sebanyak 112 unit dengan dana sebesar Rp3.565.500.000,00 berupa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Provinsi dengan dana sebesar Rp330.310.000,00, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/ Kota sebesar Rp369.250.000,00, Peningkatan Kapasitas Balai penyuluhan Kecamatan (BP3K) sebagai Posko Pelaksanaan Pembangunan Pertanian sebesar Rp2.492.140.000,00, dan Dukungan Operasional Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) sebesar Rp346.800.000,00

2. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi sebesar Rp8.687.560.000,00 berupa pembayaran BOP Penyuluh PNS maupun THLTBPP sebanyak 1.198 orang, Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya sebanyak 49 orang.

3. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani

Kegiatan Kelembagaan Petani yang difasilitasi dan dikembangkan sebanyak 138 unit dengan dana sebesar Rp338.700.000,00 berupa Penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani, Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani , Penilaian Kelas dan Kemampuan Kelompok Tani.

4. Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pengawasan dan pendampingan penyuluhan di sentra pangan sebanyak 392 WKPP dengan dana sebesar Rp49.000.000,00 berupa kegiatan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK.

5. Peningkatan Dukungan Sarana, Prasarana dan Pembiayaan Penyuluhan Pertanian

a) Kegiatan Tambahan Honorarium THLTBPP sebesar Rp476.000.000,00 untuk 341 orang

b) Kegiatan Materi Penyuluhan yang dihasilkan sebesar Rp378.584.000,00 sebanyak 145 judul berupa langganan majalah pertanian untuk kelembagaan penyuluhan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, Penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Penyusunan dan penyebaran media informasi spesifik lokasi di BP3K.

c) Kegiatan Materi Penyuluhan yang dihasilkan sebanyak 18 judul dengan dana sebesar Rp25.920.000,00 berupa langganan majalah pertanian untuk kelembagaan penyuluhan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan

Sementara itu dana dekonsentrasi APBNP yang digunakan untuk pencapaian terget swasembada padi, jagung dan kedelai dimana dana tersebut diletakkan pada Dinas Pertanian Provinsi Jambi sebesar Rp7.487.540.000,00 terealisasi sebesar Rp6.119.472.868, atau 81,73%.

b. Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Anggaran untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp791.960.000,00. Adapun program yang dilaksanakan mencakup beberapa aspek Kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan dana sebesar Rp171.000.000,00, Penyuluh

Perikanan berupa penyelenggaraan penyuluhan KP oleh penyuluh PNS melalui optimalisasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebanyak 63 orang Penyuluh Perikanan dengan dana sebesar Rp250.800.000,00, Penguatan Kegiatan Penyuluhan Perikanan Swadaya sebesar Rp242.350.000,00, kegiatan Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi sebesar Rp5.800.000,00, Penyediaan dokumen kesekretariatan kegiatan penyuluhan KP berupa operasional database SIMLUH KP, Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan, Penyusunan Laporan Tahunan dan Lakip serta Monitoring dan evaluasi sebesar Rp51.090.000,00. Kegiatan lain adalah Administrasi kegiatan dan operasional kantor sebesar Rp70.920.000,00.

Sampai dengan akhir tahun anggaran, alokasi anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp783.307.405,00 atau 98,91 % dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.18
Kondisi Penyuluhan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	PENYULUH			JUMLAH KELOMPOK PERIKANAN			
		PNS	PPB	SWA	KELAS KELOMPOK PERIKANAN			
					PEMULA	MADYA	UTAMA	JUMLAH
1	Kota Jambi	5	5	91	39	28	1	68
2	Ma. Jambi	5	4	100	87	27	3	117
3	Batanghari	6	2	100	57	21	-	78
4	Tebo	-	2	-	42	-	-	42
5	Bungo	8	-	24	67	-	-	67
6	Sarolangun	-	2	-	33	-	-	33
7	Merangin	14	1	20	62	-	-	62
8	Tanjab Timur	5	3	10	53	-	-	53
9	Tanjab Barat	-	3	-	62	-	-	62
10	Kerinci	4	3	27	255	1	-	255
11	Sei Penuh	7	1	20	48	1	1	50
12	Provinsi Jambi	6	-	9	-	-	-	-
JUMLAH		61	26	392	805	78	5	857

Data diambil dari kegiatan pengumpulan data statistik Set. Bakorluh 2015
Cat : PNS : Penyuluh Perikanan PNS

PPB : Penyuluh Perikanan Bantu
SWA : Penyuluh Perikanan Swadaya

c. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan hutan ditingkat tapak. Dukungan dana dekonsentrasi yang diterima adalah sebesar Rp462.965.000,00 yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja (IKK) Pusat Penyuluhan Kehutanan yaitu fasilitasi peningkatan penyuluh kehutanan berupa pembinaan penyuluhan kehutanan, fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan, dan administrasi umum.

Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan adalah sebesar Rp434.186.000,00 atau 93,78%. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah fasilitasi percontohan penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat (pengembangan tahun ke 3 UUPK) dengan dana sebesar Rp25.000.000,00 karena kegiatan ini memang tidak dilaksanakan pada tahun 1 dan 2 tetapi dananya masih tetap muncul pada tahun ke 3 ini. Adapun kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan melalui dana dekonsentrasi tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pemenuhan jumlah tenaga penyuluh kehutanan sesuai dengan kebutuhan (PK PNS, PKSM dan Penyuluh swasta)
2. Memprioritaskan masyarakat pelaku utama pembangunan kehutanan di dalam dan sekitar KPH sebagai sasaran utama penyuluhan kehutanan
3. Menetapkan kawasan KPH sebagai bagian penting wilayah kerja penyuluh kehutanan

4. Membangundan mengembangkan kelembagaan petani hutan (KTH) dan mengembangkan kelembagaan usaha berbentuk koperasi petani hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PK, mengembangkan metode dan materi penyuluhan
6. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
7. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh kehutanan

Tabel 5.19
Kondisi Penyuluhan Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	PENYULUH			JUMLAH KELOMPOK KEHUTANAN			
		PNS	PKSM	SWA	KELAS KELOMPOK KEHUTANAN			
					PEMULA	MADYA	UTAMA	JUMLAH
1	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-
2	Ma. Jambi	-	-	-	-	-	-	-
3	Batanghari	-	-	-	-	-	-	-
4	Tebo	2	-	-	8	-	-	8
5	Bungo	5	-	-	75	-	-	75
6	Sarolangun	5	1	-	58	-	-	58
7	Merangin	4	6	-	-	-	-	-
8	Tanjab Timur	3	-	-	51	-	-	51
9	Tanjab Barat	1	-	-	-	-	-	-
10	Kerinci	4	7	-	84	-	-	84
11	Sei Penuh	6	6	-	23	-	-	23
12	Provinsi Jambi	1	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		31	20		299	-	-	299

Ctt : PKSM = Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
Data diambil dari kegiatan pengumpulan data statistik Set. Bakorluh 2015

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Sumber dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Satker Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi adalah Kementerian

Pertanian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan rincian sebagai berikut:

- Kementerian Pertanian RI sebesar Rp13.523.364.000,00.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp791.960.000,00
- Kementerian LH dan Kehutanan RI sebesar Rp462.965.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- pemisahan kelompok tani dan gapoktan dalam 3 subsektor ini yang belum sepenuhnya terlaksanadimanadata kelompok tani pertanian, kelompok tani perikanan, dan kelompok tani kehutanan masih berupa data gabungan 3 sektor dimaksud.
- Tidak sebandingnya kuantitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan denganluas wilayah dan banyaknya sasaran penyuluhan peningkatan produksi yang harus dicapai.
- Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas materi penyuluhan,belum terdistribusinya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan penyuluh dalam mendapat teknologi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan penyuluh dan petani
- Masih terbatasnya kemampuan pelaku utama, pelaku usaha dan petugas dalam penerapan inovasi teknologi dalam budidaya dan teknologi pasca panen baik dari sub sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan, maupun hortikultura.
- Mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian di berbagai tingkatan belum tertata dengan baik, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik.

b. Solusi

- Pemisahan data kelompok tani sesuai sektor

- Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah tentang peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM penyuluh pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk mencapai yang lebih baik untuk kepentingan petani dinegeri ini.

5.2.2.13 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program yang diterima dan telah dilaksanakan oleh Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp370.789.000,00 dan telah terealisasi secara fisik dan keuangan sebesar 95,39% untuk kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pembinaan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keuangan KKP dengan output dokumen laporan wilayah uang dan barang
2. Pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KKP dengan output dokumen perencanaan anggaran; dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan layanan perkantoran.
3. Pengembangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan dengan output layanan sistem informasi

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Anggaran dana dekonsentrasi yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp2.636.756.000,00 dan telah terealisasi keuangannya sebesar 80,79% dan fisik 85,58% untuk kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawalan kapal perikanan

2. Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan
3. Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan
4. Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan
5. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)
6. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

c. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp1.824.433.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 76,5% dan fisik 81,04. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan
2. Pengelolaan sistem perbenihan ikan
3. Pengelolaan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan
4. Pengelolaan sistem produksi pembudidayaan ikan
5. Pengelolaan sistem usaha pembudidayaan ikan
6. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Anggaran dana dekonsentrasi yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp946.401.000,00 dan telah terealisasi keuangan dan fisiknya sebesar 96,80% untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas
2. Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan
3. Operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan
4. Operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan

5. Operasional pemantauan pemanfaatan SDKP dan pengembangan infrastruktur pengawasan
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDKP

e. Program Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp1.567.380.000,00 dan keuangan telah terealisasi sebesar 92,07% serta fisik 100%. Adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan serapan pasar domestik hasil kelautan dan perikanan
2. Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan
3. Pengembangan produk dan usaha pasca panen non pangan hasil perikanan
4. Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pasca panen dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

f. Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau – pulau kecil

Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp885.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar 95,39% secara fisik dan keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis
2. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha
3. Pendayagunaan pesisir dan lautan
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KP3K

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana dekonsentrasi yang diterima oleh Satker Dinas Kelautan dan Perikanan RI berjumlah Rp8.230.759.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI : Rp370.789.000,00
- Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI : Rp2.636.756.000,00
- Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI : Rp1.824.433.000,00
- Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI : Rp946.401.000,00
- Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI : Rp1.567.380.000,00
- Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI : Rp885.000.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh undangan dari pusat yang dibawah target. Selain itu, bencana kabut asap dan disusul dengan penutupan Bandara Sultan Thaha selama beberapa bulan mengakibatkan gagalnya penyelenggaraan pertemuan tingkat nasional yang semula akan dilaksanakan di Jambiserta beberapa pertemuan yang seharusnya dihadiri oleh narasumber pusat tidak dapat dihadiri sehingga anggaran kegiatan tidak terserap maksimal.

5.2.2.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

a. Program pengembangan kepariwisataan

Program yang diterima dan telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang didanai oleh dana dekonsentrasi TA. 2015 adalah program pengembangan kepariwisataan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengembangan infrastruktur dan ekosistem

Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp200.000.000,00 dan telah terealisasi 87% untuk pelaksanaan rapat koordinasi tugas pembantuan pengembangan daya tarik wisata tingkat Provinsi Jambi

2. Kegiatan Peningkatan tata kelola destinasi

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan gerakan pengembangan desa wisata, peningkatan kapasitas usaha masyarakat di destinasi pariwisata dan workshop pengembangan sistem sadar wisata dan sapta pesona dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,10% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.198.700.000,00.

3. Kegiatan Pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata

Dari alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp98.000.000,00 telah terealisasi sebesar 99,63% untuk pembuatan sarana dan prasarana promosi pariwisata, pembuatan master fotografi objek wisata unggulan Provinsi Jambi, *goody bag* dan souvenir khas Jambi.

4. Kegiatan Pengembangan Segmen Pasar Personal

Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp250.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar 94% untuk penyelenggaraan partisipasi promosi pariwisata melalui Direct Promotion Pariwisata Jambi di dalam negeri, Pameran Batanghari Festival 2015, partisipasi dalam pameran Jambi

Expo di Jakarta serta partisipasi dalam pameran Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dana dekonsentrasi yang diterima oleh Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah Rp1.746.700.000,00 yang bersumber dari Kementerian Pariwisata RI, terdiri dari Rp1.398.700.000,00 bersumber dari Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Rp348.000.000,00 dari Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara.

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program bersumber Dana Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata RI ini tidak menemui permasalahan. Bla bla bla.

5.2.2.15 Bappeda Provinsi Jambi

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Pada tahun anggaran 2015, Satker Bappeda Provinsi Jambi melaksanakan dua program yaitu:

a. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Bappenas dengan realisasi sebesar 89.30% dan telah dilaksanakan untuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari instansi BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, serta Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja RAD-GRK Provinsi dan Kabupaten/Kota, pihak

swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Lokal dan Internasional yang ada di Jambi.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peserta dapat menguasai teknik dan mampu menyelesaikan Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan (PEP) Capaian Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) pada tahun 2015. Namun secara umum kedepan perlu adanya tindak lanjut oleh stakeholders di Provinsi Jambi, untuk terus merencanakan serta melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta Perlunya perhatian yang lebih spesifik dari Pemerintahan Pusat dalam hal pencapaian target RAD GRK Provinsi Jambi. Bentuk dukungan yang perlu di lakukan antara lain seperti penerbitan peraturan perundangan yang mendukung kebutuhan daerah terutamakabupaten/ kota dalam menerapkan RAD GRK, penyediaan sistem inventory dan monev GRK, dukungan pembiayaan, dan fasilitasi guna memperkuat pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Jambi.

2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pencapaian RAD Millennium Development Goals (MDGs)

Rapat koordinasi ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari instansi terkait Provinsi Jambi serta SKPD lingkup kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

a) Updating data capaian MDGs Provinsi Jambi Tahun 2015 yang meliputi:

- Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan
- Pencapaian pendidikan dasar untuk semua
- Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

- Penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu, serta
 - Memerangi HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
- b) Peta permasalahan baik perencanaan maupun pelaksanaan MDGs di Provinsi Jambi.
- c) Penilaian Kabupaten/kota terbaik dalam pelaporan pencapaian target MDGs.
3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pencapaian RAD Pangan dan Gizi (PG)
- Rapat koordinasi ini diikuti oleh 100 peserta, yang terdiri dari instansi Provinsi Jambi serta SKPD lingkup kabupaten/ kota terkait dalam Provinsi Jambi.
- Hasil Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jambi Tahun 2015, antara lain:
- a) Diperolehnya gambaran keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jambi.
- b) Tersedianya bahan bagi Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jambi.
- c) Diperolehnya masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jambi tahun berikutnya.
5. Rapat Koordinasi perbaikan kualitas data dan dokumen perencanaan penganggaran serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan menggunakan alat P3BM dan SIMPADU
- Rapat Koordinasi diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta fasilitator kabupaten lokasi PKKPM/PIE di Provinsi Jambi.

Hasil Rapat Koordinasi Percepatan dan Sinkronisasi PKKPM/PIE Provinsi Jambi Tahun 2015 ini adalah:

- a) Diketuinya Progress, Permasalahan dan Tindak Lanjut Program PKKPM dan PIE di Lokasi PKKPM dan PIE, dan
 - b) Merumuskan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi, Kab/Kota dan Stakeholder terkait, melalui dukungan program/kegiatan baik melalui APBD, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
6. Koordinasi dan sinkronisasi rencana program investasi infrastruktur prioritas melalui integrasi kebijakan nasional dan daerah termasuk pembiayaannya.
- Rapat koordinasi ini diikuti oleh 100 orang peserta, yang terdiri dari instansi : Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Biro APKS dan instansi terkait lainnya baik Provinsi maupun Kabupaten /Kota.
- Materi yang disampaikan pada rapat koordinasi ini antara lain tentang konsepsi investasi infrastruktur dalam mendorong pengembangan ekonomi wilayah serta memberikan pemahaman kepada kabupaten/kota untuk mendorong investasi melalui percepatan pembangunan serta bagaimana menghadapi hambatan terkait investasi tersebut, kemudian dilakukan sinkronisasi Rencana Aksi Investasi baik antar sektor dalam skala lokal, regional dan nasional serta mengembangkan *Center of Excellence* di setiap koridor ekonomi. Secara fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94,98%.
7. Koordinasi dan Pelaporan Pemantauan Dana Dekonsentrasi,Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama
- Dalam melaksanakan kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi aplikasi sistem pelaporan e-monev yang telah dibangun oleh PPN/Bappenas dan mengoordinasikan satker pelaksana kegiatan dalam pelaporan setiap triwulannya.
8. Fasilitasi perkuatan koordinasi peningkatan kualitas Musrenbangnas.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh 100 orang peserta terdiri dari seluruh SKPD Provinsi dan Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi.

b. Program Bina Pembangunan Daerah

Dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan program ini bersumber dari Kementerian Dalam Negeri RI dan telah terealisasi fisik sebesar 76% dan keuangan sebesar 58,03% untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan di Jakarta
2. Koordinasi dengan tim Pokja Provinsi dalam rangka pelaksanaan DAK di Provinsi
3. Koordinasi dengan tim Pokja kabupaten dalam rangka pelaksanaan DAK Kabupaten/ kota
4. Rapat koordinasi kunjungan lapangan ke kabupaten/kota
5. Monitoring pelaksanaan DAK Provinsi di Kabupaten/ kota
6. Penyusunan laporan DAK per triwulan

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Total dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Satker Bappeda Provinsi Jambi adalah sebesar Rp1.574.291.000,00 bersumber dari dua Kementerian/ Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebesar Rp931.291.000,00
- Kementerian Dalam Negeri RI sebesar Rp643.000.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan hanya ditemui pada pelaksanaan Program Bina Pembangunan Daerah akibat keterlambatan DIPA karena perubahan

nomenklatur pada Kementerian Dalam Negeri yang berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan tidak maksimal. Solusi yang telah dilakukan adalah penjadwalan yang ketat atas pelaksanaan kegiatan, namun beberapa kegiatan seperti rakor pokja DAK triwulan I dan II tetap tidak bisa dilaksanakan terkait triwulan yang telah lewat.

5.2.2.16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Adapun Program dan Kegiatan dana dekonsentrasi yang dilaksanakan/dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal.
2. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis
4. Penjaminan pangan asal hewan (PAH) yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non PAH
5. Kegiatannya

b. Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian

Terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Workshop Analisis Pasar
2. Pengumpulan dan Pengiriman Data Informasi Pasar
3. Mengikuti Pameran Produk Pertanian
4. Pemutakhiran data pengolahan hasil peternakan

5. Pertemuan moneyv PHP
6. Bimtek Pengolahan Hasil Pertanian

c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

Program ini terdiri dari kegiatan supervisi dan pembinaan aspek air; supervisi dan pembinaan aspek lahan serta supervisi dan pembinaan aspek alsintan.

2. Jumlah dan Sumber Anggaran

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi mengelola anggaran dana dekosentrasi sebesar Rp6.415.715.000,00 yang bersumber dari Kementerian Pertanian.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program ini.